



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BONE

2018 - 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah *'Azza Wa Jalla*, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 telah selesai disusun.

Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Renstra Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen ini juga telah berpedoman serta mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018–2023.

Dokumen Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi, misi, dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Bone, kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program/Kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut. Selain penetapan IKU untuk pencapaian sasaran strategis kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, dalam dokumen ini juga dirumuskan dan

ditetapkan penetapan indikator kinerja utama untuk pencapaian sasaran strategis organisasi perangkat daerah (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) yang terjabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas dan penunjang dalam mendukung pencapaian dari sasaran-sasaran tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan Renstraini.

Watampone, 16 April 2019

Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Bone



H. ASKAR, S.ST., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19681231 199803 1 042

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.....	12
2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.....	34
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2013- 2017.....	59
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	64
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	66
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan ..	66
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih...	68

3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	70
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	72
3.5.	Penentuan Isu-Isu Startegis	73
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		76
4.1.	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	77
4.2.	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	78
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		84
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		98
BAB VIII PENUTUP		100

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Sarana dan Prasarana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Bone	37
Tabel 2. 2. Sungai Dan Saluran Pembuang Yang Telah Tersentuh Oleh Dana APBD Kabupaten Bone	38
Tabel 2. 3. Embung Yang Telah Tersentuh Oleh Dana APBD Kabupaten Bone .	50
Tabel 2. 4. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bone Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi	54
Tabel 2. 5. Aset, Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air di Kabupaten Bone Hingga Tahun 2018	59
Tabel 2. 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Tabel T-C.23.)	60
Tabel 2. 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Tabel T-C.24.)	63
Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.25)	80
Tabel 4. 2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023	81
Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Tabel T-C.26)	83
Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (Tabel T-C.27)	86
Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone	33
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik PD dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih. Secara umum Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yakni:

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang;
2. Langkah-langkah strategis dan sasaran yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas.

Penyusunan Dokumen Renstra ini sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone akan sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan

mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Kabupaten Bone.

Tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Rencana Strategis sesuai Tupoksi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023. Selain itu Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang :

- a. Penyusunan Renstra keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- d. Penyiapan data dan Informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone merupakan implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RenstraPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam

jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3226).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah

Provinsi.

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Renstra Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sulawesi-Selatan tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi-Selatan tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bone.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023.
28. Peraturan Bupati Bone Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 62).
29. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penulisan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu :

1. Untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 kedalam perencanaan strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program selama 5 tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis, yaitu :

1. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan

visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu pada kebijakan Sumber Daya Air tingkat nasional dan provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

2. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone.
3. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone Tahun 2019-2023.
4. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
5. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
6. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 disusun, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan dan sistematika penulisan;

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD;

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri dari : Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan , telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;

Bab IV Tujuan dan Sasaran, terdiri dari: tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan merupakan penjabaran visi Bupati Bone yang lebih spesifik dan terukur. Rencana sasaran yang hendak dicapai, strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, Strategi diwujudkan dalam kebijakan program, yang terakhir pada Mengenai Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan terdiri dari program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Mengacu Kepada Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone maka organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone mengarahkan kepada Struktur Organisasi pola maksimal.

A. Organisasi Dinas, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 3 Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Bina Teknik dengan 3 Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Bina Teknik.
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi Bina Teknik.
 - c. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air.
4. Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk 3 Seksi :
 - a. Seksi Konservasi Danau, Embung dan Waduk.
 - b. Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir.
 - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk.
5. Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku 3 Seksi :
 - a. Seksi Irigasi dan Air Baku.
 - b. Seksi Rawa dan Pantai.
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.

6. Kepala Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Seksi :
 - a. Seksi Hidrologi dan Kualitas Air.
 - b. Seksi Bina Kelembagaan.
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air.

B. Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok:

- a) Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Bone.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin a) dan b), Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air meliputi bina teknik, pembinaan pengelolaan sumber daya air, pembinaan program sungai, danau, waduk, pantai, irigasi dan rawa serta air baku;
- penyelenggaraan urusan sumber daya air serta pelayanan umum di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya air, pembinaan program sungai, danau, waduk, pantai, irigasi dan rawa serta air baku;
- pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya air serta pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, pembinaan program sungai, danau, waduk, pantai, irigasi dan rawa serta air baku;

- Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
- Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- Pelaksanaan pembinaan staf; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
- Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- Membuat rencana kerja tahunan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
- Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
- Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;

- Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- Melaksanakan pembinaan staf; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

3. Bidang Bina Teknik

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Bina Teknik mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, strategi, rencana pengembangan jangka panjang dan jangka menengah, menyelenggarakan perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan melaksanakan monitoring evaluasi kinerja sarana dan prasarana dasar sumber daya air serta menyiapkan data dan informasi sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas maka Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi :

- Penyiapan data dasar berupa peta, data potensi dan pemanfaatan air serta hasil penelitian lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan, pengendalian pembangunan, prasarana dan sarana sumber daya air;
- Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang pengelolaan sumber daya air;
- Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait

tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perencanaan Bina Teknik

Seksi Perencanaan Bina Teknik membantu kepala bidang bina teknik yang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perencanaan bina teknis;
- Melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi sumber daya air;
- Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;
- Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

b. Seksi Monitoring, Evaluasi Bina Teknik

Seksi Monitoring, Evaluasi Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal monitoring, evaluasi Bina Teknik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimaksud Seksi Monitoring, Evaluasi Bina Teknik mempunyai fungsi :

- Melakukan monitoring fisik keuangan dan evaluasi kinerja sarana dan prasarana sumber daya air;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja

konstruksi sarana dan prasarana jaringan irigasi dan monitoring keadaan kebutuhan air irigasi;

- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi irigasi;
- Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya

c. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air

Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal Pemngumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- Mengumpulkan data dan informasi sumber daya air;
- Melakukan pengolahan data dan informasi sumber daya air;
- Melakukan penyebarluasan data dan informasi sumber daya air;
- Melakukan penyimpanan data dan informasi sumber daya air;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

4. Bidang Sungai, Danau dan Waduk

Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengembangan dan konservasi pelestarian sungai, danau. Waduk dan sumber daya air lainnya, melaksanakan perbaikan sungai, danau, waduk dan sarana prasarana pengendalian banjir.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan, pembinaan pengelolaan sungai, danau, waduk serta sumber daya air lainnya;
- Perencanaan teknis dan pelaksanaan teknis pengembangan sungai, danau dan waduk;
- Pelaksanaan, pembinaan pengaturan teknis dan pengendalian serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- Pelaksanaan, pengendalian kelestarian sumber daya air dan penyusunan AMDAL sumber daya air; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

a. Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk

Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal pengembangan Konservasi, Danau, Embung dan Waduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Konservasi Danau, Embung dan Waduk mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk;
- Melaksanakan pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air

sungai, danau, embung dan waduk; dan

- Melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Wadukterkait tugasnya.

b. Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir

Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal pemeliharaan Sungai dan Pengendalian Banjir.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir mempunyai fungsi :

- Menyiapkan perencanaaan di bidang inventarisasi, pengendalian dan upaya peningkatan nilai atas sumber daya yang ada pada sungai dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana sungai dan fasilitas lainnya dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- Melaksanakan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai;
- Melakukan upaya peningkatan nilai sumber daya yang ada pada sungai;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang inventarisasi, pengendalian dan upaya peningkatan nilai atas sumber daya yang ada pada sungai dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Wadukterkait tugasnya.

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal Operasi dan

Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan, pemeliharaan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk;
- Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya.

5. Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku

Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku mempunyai tugas kepala dinas dalam melaksanakan peningkatan, pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai, irigasi primer dan sekunder serta sarana prasarana air baku dan melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknik di bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku;
- Pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder;

- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai;
- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku;
- Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknik di bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

a. Seksi Irigasi dan Air Baku

Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal kegiatan Irigasi dan Air Baku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Irigasi dan Air Baku mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

b. Seksi Rawa dan Pantai

Seksi Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal Rawa dan Pantai.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Rawa dan Pantai mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan reabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai;
- Melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah;
- Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasi pemanfaatan sumber daya air;
- Melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyediaan alokasi air untuk berbagai kebutuhan;

- Mengumpulkan dan menyusun data untuk rencana tata tanam global;
- Mengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan operasi, pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

6. Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air serta pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air.

Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perencanaan di bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air
- Pembinaan pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air termasuk air baku dan tanah bantaran, tanah pengairan, penambahan bahan galian golongan – c pada alur sungai, serta pembinaan penyuluhan dan perizinan;
- Pembinaan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- Pembinaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air,

kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta Pembinaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

a. Seksi Hidrologi dan Kualitas Air

Seksi Hidrologi dan Kualitas Air dipimpin oleh kepala seksi Hidrologi dan Kualitas Air yang mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan perencanaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air
- Memproses pemberian rekomendasi izin penambangan bahan galian C pada sumber air, alur sungai, jaringan irigasi dan saluran drainase;
- Memberikan rekomendasi izin pembuangan limbah cair pada sumber-sumber air;
- Memberikan rekomendasi izin pengembangan dan pengelolaan air permukaan dan air tanah;
- Melaksanakan pembinaan pemanfaatan sumber daya air dan pengamanan aset sumber daya air;
- Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan air dan pengamanan aset;
- Memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan pada badan sungai, jaringan irigasi, saluran drainase dan bangunan pelengkap;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

b. Seksi Bina Kelembagaan

Seksi Bina Kelembagaan dipimpin oleh kepala seksi Bina Kelembagaan yang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perencanaan pembinaan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan sumber daya air;
- Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- Memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan air di tingkat usaha tani atau saluran tersier;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan sumber daya air; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan prasarana dan sarana sumber daya air

Seksi Pengendalian Pemanfaatan prasarana dan sarana sumber daya dipimpin oleh kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasaranadan Sarana Sumber Daya Air yang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perencanaan pengendalian pemanfaatan sumber daya Air;
- Melaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air pada wilayah sungai;
- Melaksanakan pemanfaatan sumber daya air;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

7. Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPT) dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurus.

Susunan Organisasi UPT Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT);
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Jabatan Pelaksana.

a. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan sebagian tugas yang menyangkut operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Pelaksanaan administrasi UPT;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala UPT, meliputi :

- Menyusun RRTG dan RTTD sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A;
- Menetapkan besarnya faktor-Kuntuk pembagian air jika debit sungai menurun;
- Mengadakan rapat dikantor UPT setiap minggu untuk

mengetahui permasalahan operasi, hadir para juru pengairan, petugas pintu air (PPA),petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A;

- Rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan pemeliharaan, hadir para juru pengairan,petugas pintu air (PPA),petugas operasi bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A;
- Menghadiri rapat di kecamatan dan dinas PSDA Kabupaten daam kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- Membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi dan pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A;
- Membuat Laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

b. Tugas dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas Membantu Kepala UPT dalam mengoordinasi kan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- Mengumpulkan,Pengelolaan bahan data/informasi guna penyusunan rencana kerja UPT;
- Melaksanakan Pencatatan, pengarsipan dan memeriksa kelengkapan persuratankantor , menyiapkan dan menandatangani tanda terima surat atau baranglainnya;
- Menindaklanjuti surat dan mendistribusikan surat sesuai isi disposisi kepala UPT;
- Menginvertalisir dan mendata jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai kontrakan/harian;

- Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas.
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Tugas dan Uraian Tugas Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Juru Operasi dan Pemeliharaan Membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- Melaksanakan instruksi dari Kepala UPT tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur;
- Memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan;
- Memberi saran kepada petani tentang awal tanam & jenis tanaman;
- Pengaturan giliran;
- Mengisi papan operasi;
- Membantu kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan;
- Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para pekerja saluran (PS) dan petugas pintu air (PPA);
- Mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh pemborong;
- Bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A melakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi;
- Menyusun/memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati;
- Pengumpulan Data Debit;
- Pengumpulan data tanaman & kerusakan tanaman;

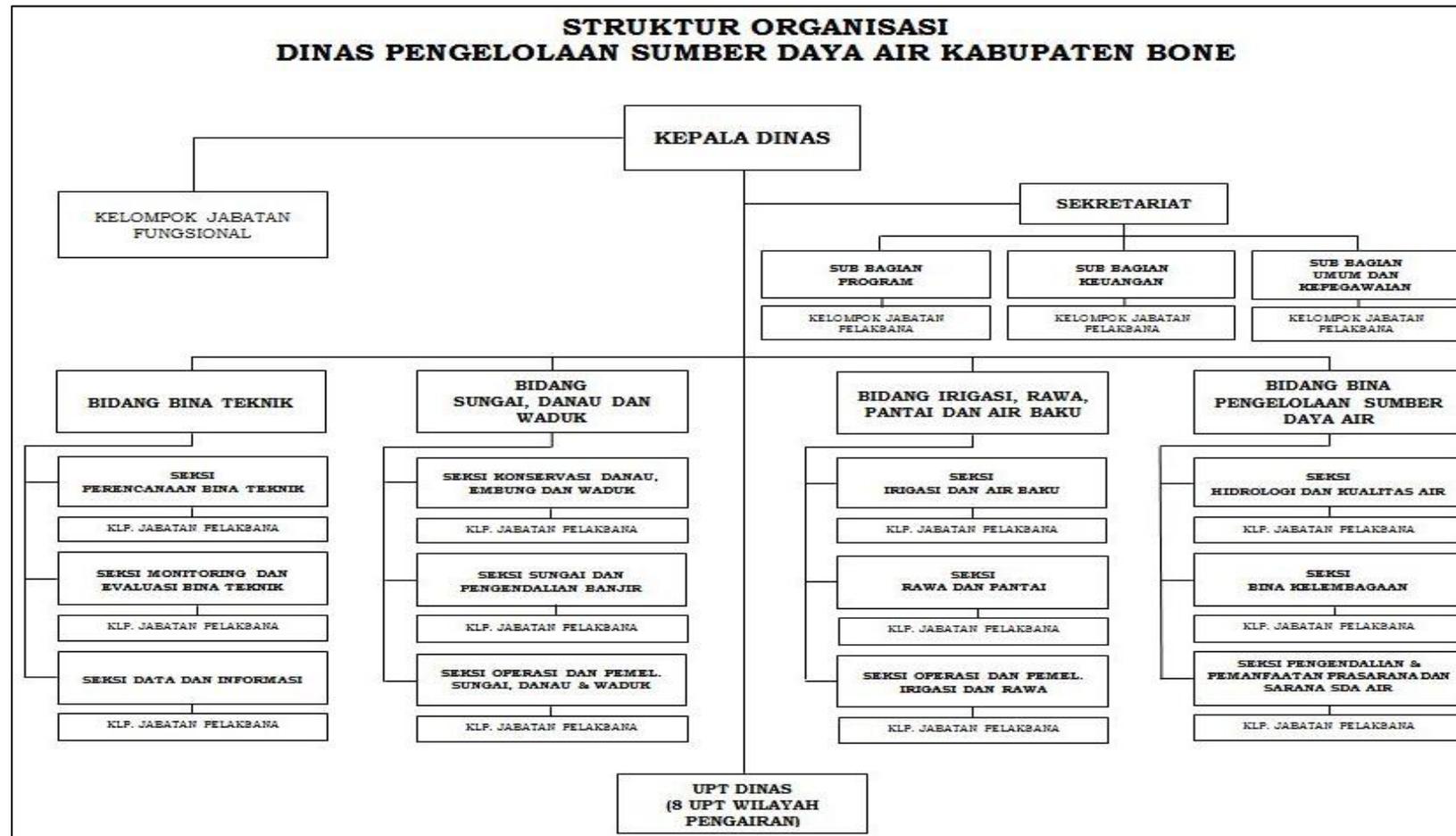
- Pengumpulan data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah);
 - Mengumpulkan kejadian banjir kepada UPT;
 - Melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada UPT;
 - Membuat Laporan pemeliharaan mengenai :Kerusakan saluran dan bangunan air, realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala, menaksir biaya pemeliharaan berkala.
- d. Tugas dan Uraian TugasPengolah Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air Membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan, Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :
- Melakukan kegiatan pengumpulan,pendokumentasian/ penginputan dan pengolahan dibidang sumber daya air;
- e. Tugas dan Uraian Tugas Penjaga Pintu Air
Penjaga Pintu Air membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan pintu-pintu air, Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :
- Membuka dan Menutup Pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah juru Operasi dan Pemeliharaan;
 - Memberi minyak pelumas pada pintu air;
 - Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
 - Membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan sadap/bagi sadap dan di sekitar alat pengukur debit;
 - Mencatat kerusakan bangunan air/pintu air pada blangko pemeliharaan;
 - Memelihara saluran sepanjang 50 m di sebelah hilir bangunan sadap.

f. Tugas dan Uraian Tugas Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (POB)

Penjaga Pintu Air membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan bendung,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- Melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang;
- Melaksanakan pengurasan kantong lumpur;
- membuka/menutup pintu pengambilan utama,sesuai debit dan jadwal yang direncanakan;
- Mencatat besarnya debit yang mengalir/atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi;
- Mencatat elevasi muka air banjir;
- Memberikan minyak pelumas pada pintu-pintu air;
- Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
- Mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada blangko pemeliharaan;
- Membersihkan semak belukar di sekitar bendung.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone

(Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Sekertariat Dinas PSDA. 2018)

2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone di dukung dengan sumber daya Pegawai Negeri Sipil sebanyak 136 orang yang terdiri dari :

1. Berdasarkan Status Golongan / Kepangkatan

• Golongan IV/b	sebanyak	-	Org
• Golongan IV/a	sebanyak	1	Org
• Golongan III/d	sebanyak	3	Org
• Golongan III/c	sebanyak	14	Org
• Golongan III/b	sebanyak	12	Org
• Golongan III/a	sebanyak	25	Org
• Golongan II/d	sebanyak	2	Org
• Golongan II/c	sebanyak	37	Org
• Golongan II/b	sebanyak	7	Org
• Golongan II/a	sebanyak	17	Org
• Golongan I/d	sebanyak	1	Org
• Golongan I/c	sebanyak	16	Org
• Golongan I/b	sebanyak	1	Org

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

• Pendidikan Diklat PIM II	sebanyak	-	Org
• Pendidikan Diklat PIM III	sebanyak	1	Org
• Pendidikan Diklat PIM IV	sebanyak	5	Org

3. Berdasarkan Eselonisasi

• Eselon II/b	sebanyak	-	Org
• Eselon III/a	sebanyak	1	Org
• Eselon III/b	sebanyak	4	Org
• Eselon IV/a	sebanyak	18	Org

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

- | | | | |
|-------------|----------|-----|-----|
| • Laki-laki | sebanyak | 126 | Org |
| • Perempuan | sebanyak | 10 | Org |

Selain sumber daya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdapat juga sumber daya pegawai yang berstatus Non PNS di bawah naungan UPT yang dibiayai dengan Sumber Dana APBN dan APBD sebagai berikut :

1. Tenaga UPT Yang Dibiayai Dana APBN ;

a. UPT Wilayah Palakka

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 4 | Org |
| • Petugas Pintu Air | sebanyak | 26 | Org |
| • Petugas Saluran | sebanyak | 19 | Org |

b. UPT Wilayah Sanrego

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 5 | Org |
| • Petugas Pintu Air | sebanyak | 26 | Org |
| • Petugas Saluran | sebanyak | 31 | Org |

c. UPT Wilayah Ponre-Ponre

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 2 | Org |
| • Petugas Pintu Air | sebanyak | 23 | Org |
| • Petugas Saluran | sebanyak | 18 | Org |

d. UPT Wilayah Pattiro

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 3 | Org |
| • Petugas Pintu Air | sebanyak | 19 | Org |
| • Petugas Saluran | sebanyak | 17 | Org |

2. Tenaga UPT Yang Dibiayai Dana APBD ;

a. UPT Wilayah Pattiro, Bengo, Unja, Wollangi dan Palakka

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 9 | Org |
| • Petugas Pintu Air dan POB | sebanyak | 22 | Org |
| • Urusan Operasi | sebanyak | 5 | Org |
| • Urusan Pemeliharaan | sebanyak | 3 | Org |

A. Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Inventarisasi Aset)

Dalam melaksanakan tugas rutin sehari-hari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone ditunjang dengan Sarana dan Prasarana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Bone sesuai Tabel 2.1. Dalam melaksanakan pelayanan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air juga mengelola prasarana dan sarana sumber daya air di Kabupaten Bone, yang antara lain sebagai berikut:

1. Sungai dan Saluran Pembuang

Sungai di Kabupaten Bone yang sudah pernah tersentuh program kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Bone sebanyak 244 ruas sungai dari 268 ruas sungai yang telah terdata oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Adapun saluran pembuang yang telah tersentuh anggaran APBD Kabupaten Bone sebanyak 37 ruas saluran pembuang, baik yang ada di dalam kawasan perkotaan Watampone maupun di luar perkotaan. Selengkapnya data sungai dan saluran pembuang yang telah ter-cover oleh dana APBD Kabupaten Bone disajikan dalam Tabel 2.2.

2. Embung

Embung di Kabupaten Bone yang sudah pernah tersentuh program kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Bone sebanyak 129 unit embung dari 172 unit embung yang telah terdata oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone yang selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.3.

3. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten

Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bone sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, berjumlah 224 DI, yang selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Bone

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Kondisi	Jumlah Unit
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	Suzuki Smash / FK.110 SD K6	2006	KB	1
2	Pick Up	Daihatsu Grand Max PU AC.PS / Pick Up	2013	B	1
3	Sepeda Motor	Suzuki / Suzuki-FK 110 SCD	2007	KB	1
4	Sepeda Motor	Kawasaki / LX150C (KLX 150 S)	2013	B	1
5	Sepeda Motor	Kawasaki / LX150 C (KLX 150 S)	2013	B	1
6	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150	2014	B	1
7	Mobil	Ford Ranger	2007	B	1
8	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150	2017	B	1
9	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150	2017	B	1
10	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150	2017	B	1
11	Mobil	Toyota / Kijang innova	2017	B	1
12	Sepeda Motor	Yamaha MX King	2018	B	1
13	Sepeda Motor	Yamaha MX King	2018	B	1
14	Filling Besi/Metal	Brother / 4 Laci	2008	B	1
15	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	2013	B	1
16	Lemari Besi	Brothet	2015	B	1
17	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	2015	B	1
18	Printer	Epson	2015	B	1
19	Meja Kerja Pejabat Eselon III		2015	B	1
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		2015	B	1
21	P.C Unit/Komputer PC		2017	B	5
22	Laptop Acer		2017	B	7
23	Printer		2017	B	4
24	Meja Kerja		2017	B	5
25	Kursi Kerja		2017	B	5
26	Kursi Rapat		2017	B	20
27	Mesin Tik		2017	B	1
28	Printer Pita		2017	B	1
29	Printer Portable		2017	B	1
30	Proyektor		2017	B	1
31	G P S	Garmin Montana	2017	B	2
32	Lemari Arsip		2017	B	4
33	AC 1 PK		2017	B	4
34	AC 1/2 PK		2017	B	3
35	Meja Kerja		2017	B	1
36	Meja Rapat		2017	B	12
37	Meja Rapat		2017	B	1
38	Kursi Kerja		2017	B	1
39	Kursi Rapat		2017	B	6
40	Kursi Rapat		2017	B	30
41	Meja Kerja		2018	B	6
42	Kursi Kerja		2018	B	6
43	Lemari Arsip		2018	B	6
44	Lemari FILING Cabinet		2018	B	4
45	P.C Unit/Komputer PC		2018	B	2
46	Printer		2018	B	2
47	AC 1/2 PK		2018	B	2
48	Kamera		2018	B	1
49	Podium		2018	B	1

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PSDA, 2018.

Tabel 2.2. Sungai Dan Saluran Pembuang Yang Telah Tersentuh Oleh Dana APBD Kabupaten Bone

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maksimum (m ³ /detik)	Debit Minimum (m ³ /detik)	Letak	
								Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RUAS SUNGAI									
1	S. PALAKKA	20	55	50	3	3.394	1.000	Lintas Kecamatan	
2	S. BIRU	9	5	3.5	1.5	10.392	0.611	Kelurahan Biru	Tanete Riattang
3	S. CALOKO	9	5	4	1.5	0.447	0.168	Kelurahan Bukaka	Tanete Riattang
4	S. MALLAJENA	2.7	5.5	3	1.2	0.546	0.209	Kelurahan Bukaka	Tanete Riattang Barat
5	S. PALLENGORENG	3.5	6	5	1.5	0.447	0.168	Kelurahan Majang	Tanete Riattang Barat
6	S. PANYULA	2	8	7	1.5	0.947	0.768	Kelurahan Panyula	Tanete Riattang
7	S. TORO	3	5	4	1.5	1.447	0.568	Kelurahan Toro	Tanete Riattang Barat
8	S. PAPPOLO	7	6	5	1.5	0.447	0.168	Kelurahan Pappolo	Tanete Riattang
9	S. MADURI	5.5	6.5	5	2.5	8.5	0.7	Desa Maduri	Palakka, Barebbo
10	S. COMPONGNGE	4.5	5	4	1.5	0.447	0.168	Desa Componge	Awangpone
11	S. JALING	17	5.5	3	1.2	0.546	0.209	Desa Jaling	Awangpone
12	S. UNRA	2.5	5	4.5	1	0.036	0.025	Desa Unra	Awangpone
13	S. AKO BANGE	3	6	5	1.5	0.443	0.168	Desa Liliriattang	Lappariaja
14	S. ANGASANGNGE	12	5	3	1	0.847	0.763	Desa Liliriattang	Lappariaja
15	S. ASSIRAJANGNGE	3	5	4	1.5	1.447	0.568	Desa Mattampa Walie	Lappariaja
16	S. BALUBU	7	7	5	1.3	1.154	0.135	Desa Mattirowalie	Bengo
17	S. BANA	7	6.7	5	1.3	1.144	0.13	Desa Bana	Lappariaja
18	S. BARUGAE	5	5	4.5	1.3	0.474	0.422	Desa Barugae	Lamuru
19	S. BATU LAPPA	3	5	4.5	1.5	0.474	0.445	Desa Batu Lappa	Lappariaja
20	S. BATU PUTIH	4	6	4	1.3	0.546	0.422	Desa Batu Putih	Tellu Limpoe

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	S. BATUA	3.5	5	4	1.5	0.434	0.342	Desa Sijelling	Tellu Siattinge
22	S. BENGO	13	5	4.5	1.3	0.544	0.324	Desa Bengo	Bengo
23	S. BONTO MASUNGGU	3.5	6.7	5	1.3	1.144	0.137	Desa Bonto Masunggu	Tellu Limpoe
24	S. BULO	5.5	5	4.5	1.3	0.476	0.422	Desa Mattampa Walie	Lappariaja
25	S. BULU TUNGKE	4	5	4.5	1.5	0.474	0.445	Desa Bulu Tungke	Lappariaja
26	S. CALIMPONG	2	6	4	1.3	0.567	0.476	Desa Tenri Pakkua	Lappariaja
27	S. ELLE	7	5	4	1.2	0.459	0.399	Desa Bonto Masunggu	Tellu Limpoe
28	S. INRU	2	6	5	1.2	0.449	0.122	Desa Tungke	Bengo
29	S. JEMPO	4	6	4	1.3	0.546	0.422	Desa Mattampa Walie	Lappariaja
30	S. KALOBBAE	3.5	5	4	1.3	0.692	0.758	Desa Tenri Pakkua	Lappariaja
31	S. LABONE	4	6	4	1.3	0.546	0.422	Desa Tenri Pakkua	Lappariaja
32	S. LAJANG-LAJANG	3	5.5	5	1.2	0.465	0.124	Desa Sengeng Palie	Lappariaja
33	S. LAPAWOE	11	5	3	1	0.847	0.763	Desa Sengeng Palie	Tellu Limpoe, Lappariaja
34	S. LAPINCE	11	5	4	1.5	1.447	0.568	Desa Mattampa Bulu	Lamuru
35	S. LAPP BEDDA	3.5	4	3	1.5	1.767	0.591	Desa Mamminasae	Lamuru
36	S. LAPP JUPENG	3.5	5	4	1.8	0.255	0.156	Desa Bengo	Bengo
37	S. LAPP TALLE	3.5	4	3	1.5	1.761	0.594	Mattampa Walie	Lappariaja
38	S. LASINA	3.5	6	5	1.3	0.244	0.124	Desa Lalebata	Lamuru
39	S. LEKO BALLO	5	4.5	4	1.2	0.215	0.126	Kelurahan Lalebata	Lamuru
40	S. LEMPANG	7	4	3	1.5	1.767	0.591	Desa Tonronge	Lappariaja
41	S. LIBUKANGNGE	3.5	5	4	1.8	0.255	0.156	Desa Mattampa bulu	Lamuru
42	S. LONRU	3	4	3	1.5	1.761	0.594	Desa Mattiro Walie	Bengo
43	S. LOPPA	4	6	5	1.3	0.244	0.124	Desa Polewali	Tellu Siattinge
44	S. MALAKA I	3	7	5	1.5	0.395	0.114	Desa Mattaropuli	Bengo
45	S. MALAKA II	2	4	3	1.5	1.761	0.591	Desa Mattaropuli	Bengo

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	S. MAMMINASAE	3	5	4	1.8	0.255	0.156	Desa Mamminasae	Lamuru
47	S. MASSAPPAE	3	4	3	1.5	1.761	0.594	Desa Mattampa Bulu	Lamuru
48	S. MONCONG	3	6	5	1.3	0.239	0.124	Desa Mattampa Walie	Lappariaja
49	S. MUTIARA	4.5	5.5	5	1.2	0.465	0.134	Desa Mutiara	Lamuru
50	S. NAGAE	2.5	5.5	5	1.3	0.295	0.117	Desa Pattukku Limpoe	Tellu Limpoe
51	S. PADANG LAMPE	4	5.5	4	1.2	0.223	0.122	Desa Tenri Pakkua	Lappariaja
52	S. PADANG TENGNGAE	4	8	7	2	1.465	0.834	Desa Tungke	Bengo
53	S. PADANGLOANG	5.5	5.5	5	1.3	0.295	0.117	Desa Mattampa Bulu	Lamuru
54	S. PARIGI	2.5	5.5	5	1.3	0.247	0.157	Desa Sengeng Palie	Lappariaja
55	S. PASSAPPARENG	3	5	4	1.2	0.223	0.122	Desa Massenreng Pulu	Lamuru
56	S. PISING	3	5.5	5	1.2	0.465	0.134	Desa Sengeng Palie	Lamuru
57	S. PONRO LIBURENG	4	5	4	1.2	0.223	0.122	Desa Selli	Bengo
58	S. RABUA	4	5.5	4	1.2	0.227	0.129	Desa Tondong Bua	Tellu Limpoe
59	S. RAJA	2.5	8	7	2	1.465	0.834	Desa Mattampawalie	Lappariaja
60	S. SELLI	3.5	5.5	4	1.2	0.226	0.125	Desa Selli	Bengo
61	S. SENGENGPALIE	2.5	5.5	5	1.3	0.278	0.149	Desa Sengeng Palie	Lappariaja
62	S. SOLORENG	11.5	7	6	1.5	0.466	0.267	Desa Lalebata	Lamuru
63	S. TALAGA	4	5.5	5	1.3	0.395	0.217	Desa Sengeng Palie	Lappariaja
64	S. TAPONG	4.5	5.5	5	1.3	0.247	0.157	Desa Tapong	Tellu Limpoe
65	S. TAROGI	3	5	4	1.2	0.323	0.122	Desa Sengeng Palie	Lappariaja
66	S. TELLANGKERE	5	5.5	5	1.2	0.435	0.134	Desa Tellangkere	Tellu Limpoe
67	S. TELLU LIMPOE	3.5	5	4	1.2	0.293	0.122	Desa Tellu Limpoe	Tellu Limpoe
68	S. TELLU LIPUE	2.5	6	4	1.2	0.366	0.129	Desa Mattampa Bulu	Lamuru
69	S. TEPPAE	7	8	7	2	1.465	0.834	Desa Pattukku Limpoe	Lappariaja
70	S. TOBEMPA	3	5.5	4	1.2	1.226	0.125	Desa Mattampa Walie	Lappariaja

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	S. TOMPO BARUTTUNG	2.5	7	6	1.5	1.008	0.988	Desa Pada Elo	Lamuru
72	S. TONDONG BUA	3.5	5	4	1.3	0.097	0.05	Desa Tondong Bua	Tellu Limpoe
73	S. TONRONGGE	5	7	6	1.5	1.108	0.912	Desa Tonronge	Lappariaja
74	S. TORETTE	3	5.5	4	1.5	0.117	0.459	Desa Mattampa Walie	Lamuru
75	S. TUNGKE	3	6	4.5	1.3	0.097	0.05	Desa Tungke	Bengo
76	S. ULAWENG	2.5	5	4	1.3	0.337	0.105	Desa Tenri Pakkua	Lappariaja
77	S. WALIMPONG	4	7	6	1.5	1.108	0.912	Desa Walimpong	Bengo
78	S. LOMPO	8	5.5	4	1.5	0.117	0.459	Desa Sengeng Palie	Lamuru
79	S. CAREKKO	7.3	5	4.5	1.3	0.097	0.05	Kelurahan Lalebbata	Lamuru
80	S. LABOJO	5	5	4	1.3	0.337	0.105	Desa Sengeng Palie	Lamuru
81	S. WAEKECC'E	5	8	6	1.5	2.955	1.743	Desa Waekecce'e	Lappariaja
82	S. PATTUKU LIMPOE	3.5	7	6	1.3	1.356	0.876	Desa Pattukku Limpoe	Lappariaja
83	S. AJASSAO	2.5	5	4	1.3	0.097	0.05	Desa Baringeng	Libureng
84	S. BARINGENG	3.5	7	6	1.5	1.108	0.912	Desa Baringeng	Libureng
85	S. KALUPPANG	7.5	5.5	4	1.5	0.117	0.459	Desa Swadaya	Libureng
86	S. KANRUNG	3.5	6	4.5	1.3	0.045	0.555	Desa Mattirowalie	Libureng
87	S. LAPP DATA	2	5	4	1.3	0.337	0.165	Desa Baringeng	Libureng
88	S. MALLINRUNG	4.5	8	6	2	2.575	1.743	Desa Mallinrung	Libureng
89	S. SAMAENRE	4.5	5	4	1.5	1.575	0.743	Desa Samaenre	Libureng
90	S. TINCO	3.5	5.5	4	1.5	0.117	0.459	Desa Tinco	Libureng
91	S. TODDANG LEMPIANG	5	5	4.5	1.3	0.097	0.05	Desa Tompo Bulu	Libureng
92	S. TOMPO BULU	5	5	4	1.3	0.098	0.054	Desa Tompo Bulu	Libureng
93	S. PATTIRO	30	8	5	2.9	2.555	0.743	Desa Pattiro	Barebbo, Sibulue
94	S. DEKKO	3.5	7	6	1.7	1.333	0.889	Desa mappesangka	Ponre
95	S. JERAE	3.5	5.5	4	1.5	0.117	0.459	Desa Pattimpa	Ponre

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	S. KAROPPA	7.5	5	4.5	1.3	0.097	0.05	Desa turu adae	Ponre
97	S. LERANG	5	7	6	1.3	0.097	0.05	Desa Abbumpungeng	Cina
98	S. LOMPU	2	5.5	4	1.5	0.117	0.459	Desa Lompu	Cina
99	S. PALACARI	3	5	4.5	1.3	0.097	0.05	Desa Salebba	Ponre
100	S. PANGISORENG	6	10	8	1.8	0.086	0.054	Desa Abbumpungeng	Cina
101	S. PATIMPA	4.5	6.5	6	1.3	0.095	0.051	Desa Pattimpa	Ponre
102	S. PATIONGI	3	5.5	4	1.5	0.117	0.459	Desa Cinennung	Ponre
103	S. POLEONRO	4	5	4.5	1.3	0.097	0.05	Desa Poleonro	Ponre
104	S. SABILA	2	5.5	4	1.5	0.117	0.459	Desa Padang Loang	Cina
105	S. SOGA	5.5	5	4.5	1.3	0.097	0.05	Desa Kanco	Cina
106	S. TADDAGAE	3.5	7	5	1.4	0.096	0.054	Desa Walenreng	Cina
107	S. TELLU BOCCOE	3	5.5	4	1.3	0.096	0.059	Desa Tellu Boccoe	Ponre
108	S. WARU-WARU	15	5	4	1.5	0.657	0.376	Desa Kadai	Mare
109	S. JUJI	20	6	4.5	1.3	0.155	0.098	Tunreng Tellue	Sibulue, Mare
110	S. MALLUSETASI	4	7	5	1.4	0.096	0.054	Desa Mallusetasi	Sibulue
111	S. PAKKASALO	5	10	8	2	1.448	1.058	Desa Pakkasalo	Sibulue
112	S. MACCOPE	15	5	4	1.5	0.096	0.053	Desa Massenreng Pulu	Kec. Sibulue
113	S. CINNONG	4	5.5	5	1.3	1.443	1.054	Desa Cinnong	Barebbo
114	S. KAJU	3.5	5	4	1.2	0.096	0.053	Desa Kaju	Sibulue
115	S. MASUMPU	4	6	5	1.3	1.493	1.154	Desa Kadai	Mare
116	S. BUARANGE	3.5	5	4	1.4	0.988	0.677	Desa Manajeng	Sibulue
117	S. LEWA	5	5	4	1.5	0.656	0.588	Desa Manajeng	Sibulue
118	S. BULIE	10	4.5	4	1.5	0.756	0.548	Desa Muara	Tonra
119	S. AMMEGGE	6	5	4	1.3	0.976	0.593	Desa Mallusetasi	Sibulue
120	S. CALLEPAE	7	5	4	1.2	0.655	0.322	Desa Watu	Barebbo

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	S. BULU-BULU	14	21	11	1	2.4	1.54	Desa Bulu-Bulu	Tonra
122	S. GONA	5	5	4	1.3	2.001	0.987	Desa Gona	Kajuara
123	S. KALERO	8	5	4	1.3	1.542	0.941	Desa Kalero	Kajuara
124	S. LAPUTTENG	3.5	5	4	1.3	0.938	0.256	Desa Libureng	Tonra
125	S. LONRONG	3.5	5	4	1.2	0.972	0.521	Desa Pattimpa	Kajuara
126	S. MANNERA	3	6	3	2	0.988	0.677	Desa Mannera	Salomekko
127	S. RAPP	3	5	4	1.2	0.972	0.521	Desa Rappa	Tonra
128	S. SALOMEKKO	15	6	5	1.5	1.567	1.098	Biccoing, Manner	Salomekko
129	S. TOBUNNE	12	5	4	1.2	0.979	0.529	Desa Padaelo	Kajuara
130	S. PAJALELE	5.75	6	3	2	0.988	0.677	Kelurahan Awang Tangka	Kajuara
131	S.MAPPATOBA	7.5	10	8	1.5	1.465	1.055	Desa Mappatoba	Salomekko
132	S. WARU	11	5	4	1.5	0.666	0.275	Desa Waru	Tonra
133	S. BARUTTUNG	5.5	5	4	1.5	0.665	0.545	Desa Biccoing	Tonra
134	S. TELLONGENG	4	4	3.5	1.5	0.765	0.559	Desa Tellongeng	Mare
135	S. CENRANA	5.5	4.5	4	1.3	0.764	0.553	Desa Tellongeng	Mare
136	S. DATA	3.5	5	4	1.5	0.699	0.675	Desa Data	Mare
137	S. MARE	70	4	3	1.0	0.885	0.455	Desa Kadai Dusun Bakke Aju	Mare
138	S. BARANG	4	4	3.5	1.00	0.097	0.067	Desa Cenrana	Kahu
139	S. BARUTTUNGGE	5	6	4	1.3	0.979	0.529	Desa Pationgi	Patimpeng
140	S. KELLE	10	4	3.5	1.00	0.097	0.067	Desa Bulu Tanah	Kahu, Kajuara
141	S. LAPP PORO	4	4	3.5	1.00	0.097	0.067	Desa Mattiro Walie	Bontocani
142	S. MAGGENRANG	3	6	4.5	1.5	0.966	0.526	Desa Maggenrang	Kahu
143	S. MARADDA	7	4	3.5	1.00	0.097	0.067	Desa Biru	Kahu
144	S. MAROANGING	3	4.5	3.5	1.50	0.197	0.069	Desa Talabangi	Patimpeng
145	S. MATAJANG	3	4.5	3.5	1.50	0.194	0.046	Desa Matajang	Kahu

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	S. PALATTAE	13	6	5	2	0.966	0.526	Palattae	Kahu
147	S. PAMMUSURENG	5	5	4	1.5	0.057	0.034	Kelurahan Kahu	Bontocani
148	S. SANREGO	18	7	5	1.3	7.536	2.718	Desa Sanrego	Kahu, Libureng, Bontocani
149	S. TALABANGI I	2.5	8	7	1.5	2.567	1.444	Desa Talabangi	Patimpeng
150	S. TALABANGI II	2	8	7	1.5	2.545	1.443	Desa Talabangi	Patimpeng
151	S. TALABANGI III	2	7	5	1.3	2.211	1.342	Desa Talabangi	Patimpeng
152	S. TANGKULU	3.5	6	3	1	0.057	0.034	Desa Watang Cani	Bontocani
153	S. TOLI-TOLI	8	4	3	1	0.053	0.025	Desa Palakka	Kahu
154	S. TOLI U	5	7	5	1.3	2.211	1.342	Desa Cammilo	Kahu
155	S. WATANG CANI	4	6	3	1	0.057	0.034	Desa Watang Cani	Bontocani
156	S. BANA	5.5	4	3	1	0.053	0.025	Desa Bana	Lappariaja
157	S. BONTO JAI	6	5	4	1.4	0.805	0.755	Desa Bonto Jai	Bontocani
158	S. BULU SIRUA	4.5	7	5	1.3	2.211	1.342	Desa Bulu Sirua	Bontocani
159	S. ERE CINNONG	4	6	3	1	0.057	0.034	Desa Ere cinnong	Bontocani
160	S. LAMONCONG	4	4	3	1	0.053	0.025	Desa Lamoncong	Bontocani
161	S. LANGI	3.5	4	3	1	0.053	0.025	Desa Langi	Bontocani
162	S. PERANGENG	3.5	4	3.5	1.5	0.805	0.555	Desa Lebonge	Cenrana
163	S. AJJALIRENG	2.5	6.8	6	1.5	0.887	0.567	Desa Ajjalireng	Tellu Siattinge
164	S. BOTTO	3.5	4	3	1.2	0.767	0.577	Desa Padaidi	Tellu Siattinge
165	S. CENRANAE	50	40	30	6	7.536	2.718	Lintas Kecamatan	
166	S. DEWATAE	2.5	3.5	3	1	0.667	0.577	Desa Palongki	Tellu Siattinge
167	S. IPIE	4	3	2.5	1	0.755	0.577	Desa Palongki	Tellu Siattinge
168	S. JAMPU	2	3	2.5	1.1	0.667	0.577	Desa Sijelling	Tellu Siattinge
169	S. JOMPENG	3.5	3	2.5	1.1	1.665	0.998	Desa Sijelling	Tellusiattinge
170	S. LACCORI	3.5	3	2.5	1.1	0.965	0.898	Desa Laccori	Dua Boccoe

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	S. OPO	3	20	18	4	1.965	0.898	Pompanua Riattang	Ajangale
172	S. PADA IDI	4.5	4	3.5	1.5	0.805	0.555	Desa Pada Idi	Tellu Siattinge
173	S. PALONGKI	3	4	3.5	1.5	0.905	0.655	Desa Palongki	Tellu Siattinge
174	S. PERANGENG	3.5	3	2.5	1.1	0.985	0.898	Desa Lebonge	Cenrana
175	S. SIJELLING	6	4	3.5	1.5	0.905	0.655	Desa Sijelling	Tellu Siattinge
176	S. TAJONG	5.5	4	3.5	1.5	778	0.655	Desa Tajong	Tellu Siattinge
177	S. UNYI	17	20	18	4	0.566	0.566	Desa Tempe	Dua Boccoe
178	S. PATTIRO	7	6	5	1.5	10.392	0.611	Desa Pattiro	Barebbo, Sibulue
179	S. ULO – ULO	9	12	10	2	1.965	0.898	Desa Componge	Tellu Siattinge
180	S. CIROWALI	4.5	5.5	5	1.5	0.096	0.03	Desa Cirowali	Barebbo
181	S. BUTTU	5	5	4	1.5	0.492	0.405	Kec. Ulaweng	
182	S. CAKKULO	2	7	5	2	0.515	0.336	Desa Cakkulo	Amali
183	S. COPPO MELLE	3.5	5	4	1.5	0.492	0.405	Desa tocinnong	Amali
184	S. GALUNG I	4	5.5	4	1.2	0.472	0.224	Desa Mulamenree	Ulaweng
185	S. GALUNG II	3.5	5.5	4	1.2	0.045	0.032	Desa Galung	Ulaweng
186	S. GALUNG III	2	5.5	4	1.2	0.045	0.032	Desa Galung	Ulaweng
187	S. KANNANGO	4	6	5	1.2	0.045	0.032	Desa Galung	Ulaweng
188	S. KATAPANG	2.5	5	4	1.2	0.078	0.038	Desa ulaweng	Amali
189	S. PANAMPUNG	3.5	5.5	4	1.2	0.045	0.032	Desa Timusu	Ulaweng
190	S. TABBE WALIE	3.5	5.5	5	1.2	0.078	0.038	Desa Cani Sidenreng	Ulaweng
191	S. WALENRENG	2.5	7	5	1.3	1.199	0.558	Desa Walenreng	Ulaweng
192	S. KATAPANG	1.5	5	4	1.3	0.078	0.038	Desa ulaweng	Amali
193	S. LALIDDONG	3	5.5	5	1.2	0.078	0.038	Desa Kajaolaliddong	Barebbo
194	S. TEPPU TAE	4	5.5	4	1.3	0.841	0.59	Desa teamusu	Ulaweng
195	S. MELLE	3.5	10	8	2.1	0.23	0.074	Desa Melle	Palakka

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	S. MICO	7	6	5	1.3	1.193	0.521	Pattimpa	Ponre
197	S. MINRALENG	3	5	4	2	0.095	0.054	Desa Ureng	Palakka
198	S. TANETE BUANG	3	5.4	5	1.2	0.098	0.042	Desa Matanete Bua	Palakka
199	S. CELLIE	3	5	4	1.5	0.098	0.042	Desa Ureng	Palakka
200	S. SALO TELLUE	3	5	5	1.5	0.098	0.042	Desa Watu	Barebbo
201	S. WATU	4	4.5	4	1.3	0.098	0.042	Desa Watu	Barebbo
202	S. BAKKE	3.5	5	4	1.2	0.098	0.042	Desa Kajaolaliddong	Barebbo
203	S. KAMPUNO	5.5	3.3	3	1.5	0.312	0.231	Desa Kampuno	Barebbo
204	S. PATTUKU	5.5	6	5	1.5	1.035	0.995	Desa Pattukku	Bontocani
205	S. LAPUSE	2	5.5	5	1.2	0.663	0.474	Desa Jaling	Awangpone
206	S. LANCA	2.4	5.5	5	1.5	0.566	0.234	Desa Lanca	Tellu Siattinge
207	S. PACCING	2	6	5	1.5	0.059	0.059	Desa Paccing	Awangpone
208	S. PONRE-PONRE	2	5.5	5	1.2	0.384	0.384	Desa Ponre-Ponre	Libureng
209	S. WESSA	1.6	6.6	5	1.2	0.247	0.145	Desa Lilirawang	Bengo
210	S. TODDANG JOMPI	1	6.6	5	1.2	0.275	0.206	Desa Lilirawang	Bengo
211	S. KALU	1.5	5	4.5	1.5	0.121	0.103	Desa Lilirawang	Bengo
212	S. COPPO BULU	2	4	3	1.3	0.439	0.308	Selli	Bengo
213	S. WOLLANGI	2.5	6	4	1.5	0.094	0.068	Desa Wollangi	Barebbo
214	S. PANYILI	2	6	4.5	1.3	0.078	0.044	Panyili	Palakka
215	S. CALIRUNG	2	5	4	1	0.05	0.031	Desa Lampoko	Barebbo
216	S. TARETTA	2.5	5	4	1	0.246	0.246	Desa Taretta	Ajangale
217	S. ARASOE	3	4	3	1.3	0.566	0.234	Desa Arasoe	Cina
218	S. KAWERANG	3	7	3.5	1.2	0.312	0.231	Desa Kawerang	Cina
219	S. HITEI	5	6	5	1.5	1.546	0.088	Desa Pitumpidange	Libureng
220	S. MANCIRI	5	6	4	1	0.566	0.234	Desa Manciri	Ajangale

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	S. KALIBONG	2	4	3	1.2	0.312	0.231	Desa Kalibong	Cina, Sibulue
222	S. SUGIALE	3	4	3	1.7	0.412	0.331	Desa Sugiale	Sibulue
223	S. SEPPANGE DSN TAPPERE	2	4	3	1.5	0.502	0.431	Desa Massenreng Pulu	Sibulue
224	S. APPAKKIRENG	3	4	3	1.5	0.072	0.031	Pasaka	Sibulue
225	S. BAKKE AJU	5	35	30	1.5	1.546	0.188	Desa Kadai	Kec. Mare
226	S. AMMEGGE	2	5	4	1.5	0.702	0.431	Desa Mallusetasi	Sibulue
227	S. MANGUNRENG	1	6	4	2	0.988	0.444	Desa Sumaling	Kec. Mare
228	S. LAMPOKO	3	6	5	1.5	0.788	0.344	Desa Lampoko	Barebbo
229	S. KIHAJAR	1	4	3	1.35	0.056	0.03	Kelurahan Biru	T. Riattang
230	S. TALUMAE	2	7	5	1.5	0.703	0.437	Kelurahan Bukaka	T. Riattang
231	S. WAETUO	2	11	8	1.2	0.768	0.364	Kelurahan Waetuo	Tanete Riattang Timur
232	S. NAGA ULENG	0.5	6	4	1.5	0.056	0.03	Desa Naga Ulang	Cina
233	S. TOCINA	1.5	2	1.5	1.5	0.052	0.031	Desa Tocina	Dua Boccoe
234	S. POMPANUA RIATTANG	2	7	5	3	2.877	1.988	Kelurahan Pompanua Riattang	Ajangale
235	S. CABBENG	1.5	3	2.7	1.3	0.056	0.03	Desa pattiro	Dua Boccoe
236	S. ULOE	3	8	5	2	0.768	0.364	Desa Uloe	Dua Boccoe
237	S. LABESSI	1.5	8	5	2	0.046	0.03	Desa mattiro Bulu	Libureng
238	S. PALLA ELLENG	1.4	7	5	3	2.877	1.988	Ulaweng Riaja	Amali
239	S. PADDATU	2.3	8	5	2.5	2.877	1.988	Desa Ceppaga	Libureng
240	S. KASUMPURENG	1.5	5	4	1.2	0.056	0.03	Kelurahan Tanete	cina
241	S. TANETE HARAPAN	1.5	8	7	1.1	0.051	0.029	Kelurahan Tanete Harapan	Cina
242	S. UJUNG TANAH	2	7	5	2	0.091	0.079	Desa Ujung Tanah	Mare
243	S. TANETE	2	5	4	1.2	0.031	0.029	Kelurahan Tanete Harapan	Cina
244	S. LAPANNING TABU	2	4	2.5	1.5	0.058	0.039	Kelurahan Waetuo	T. Riattang Timur

Tabel 2. 2. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RUAS SALURAN PEMBUANG									
1	S. PEMBUANG WT. PADANG CENGNGA	2	-	-	-	-	-	Desa Wt. Padang Cengnga	Dua Boccoe
2	S. PEMBUANG JL. JEND. AHMAD YANI	2	-	-	-	-	-	Kelurahan jeppe'e	Tanete Riattang Barat
3	S. PEMBUANG KALIBONG	2	-	-	-	-	-	Desa Kalibong	Sibulue
4	S. PEMBUANG BARITO	1.5	-	-	-	-	-	Kelurahan manurunge	Tanete Riattang
5	S. PEMBUANG CALOKO	2	-	-	-	-	-	Kelurahan Walanae	Tanete Riattang
6	S. PEMBUANG COPPOLEANG	1.9	-	-	-	-	-	Kelurahan Watampone	Tanete Riattang
7	S. PEMBUANG BUKAKA	2	-	-	-	-	-	Kelurahan Bukaka	Tanete Riattang
8	S. PEMBUANG LING. BIRU	2	-	-	-	-	-	Kelurahan Biru	Tanete Riattang
9	S. PEMBUANG MANURUNGE	1.5	-	-	-	-	-	Kelurahan manurunge	Tanete Riattang
10	S. PEMBUANG LANGANCA	1.5	-	-	-	-	-	Desa Ulaweng Cinnong	Ulaweng
11	S. PEMBUANG MANNAGAE	2	-	-	-	-	-	Desa Padang Loang	Cina
12	S. PEMBUANG LING. CABALU	1.5	-	-	-	-	-	Kelurahan Mattirowalie	T. R. Barat
13	S. PEMBUANG BAREBBO	2	-	-	-	-	-	Desa Barebbo	Barebbo
14	S. PEMBUANG LING. BENE	1.6	-	-	-	-	-	Kelurahan Lonrae	T. R. Timur
15	S. PEMBUANG WELADO	2	-	-	-	-	-	Desa Welado	Ajangale
16	S. PEMBUANG LACOKKONG	1.2	-	-	-	-	-	Kelurahan Watampone	Tanete Riattang
17	S. PEMBUANG PEPABRI	1.5	-	-	-	-	-	Kelurahan Biru	Tanete Riattang
18	S. PEMBUANG TAWAROE	1.5	-	-	-	-	-	Desa Tawaroe	Dua Boccoe
19	S. PEMBUANG BATU TANRE	2	-	-	-	-	-	Desa Cakkeware	Cenrana
20	S. PEMBUANG PONCENG	2	-	-	-	-	-	Kelurahan Ta'	Tanete Riattang
21	S. PEMBUANG PALLIME	2	-	-	-	-	-	Desa Pallime	Cenrana
22	S PEMBUANG NAGA ULENG	0.5	-	-	-	-	-	Desa Naga Ulang	Cenrana
23	S. PEMBUANG MATTAROPULI	1.4	-	-	-	-	-	Desa Mattaropuli	Bengo
24	S. PEMBUANG RINJANI	1.6	-	-	-	-	-	Kelurahan Watampone	Tanete Riattang
25	S. PEMBUANG WAETUO	2	-	-	-	-	-	Desa Waetuo	T. R. Timur

Tabel 2. 2. Lanjutan (selesai)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	S. PEMBUANG WOLLANGI	1.6	-	-	-	-	-	Desa Kajaolaliddong	Barebbo
27	S. PEMBUANG PALAKKA	1.9	-	-	-	-	-	Desa Bulu Tempe	T. R. Barat
28	S. PEMBUANG KAMPUNG BARU	2	-	-	-	-	-	Kelurahan Ta'	Tanete Riattang
29	S. PEMBUANG MELLE-MAJANG	2	-	-	-	-	-	Desa Melle	Palakka
30	S. PEMBUANG TANAH TENGGAH	1.5	-	-	-	-	-	Desa Baringeng	Libureng
31	S. PEMBUANG POLRES	2	-	-	-	-	-	Kelurahan Tibojong	T. R. Timur
32	S. PEMBUANG KAWERANG	1.5	-	-	-	-	-	Desa Kawerang	Cina
33	S. PEMBUANG KAMPUNO	2	-	-	-	-	-	Desa Kampuno	Barebbo
34	S. PEMBUANG LAUJU	1.7	-	-	-	-	-	Desa Panyili	Palakka
35	S. PEMBUANG SANRANGEN	1.5	-	-	-	-	-	Desa Mattanete Buang	Palakka
36	S. PEMBUANG DUSUN PAO	2	-	-	-	-	-	Desa Tellu Boccoe	Mare
37	S. PEMBUANG TURUNGENG	2	-	-	-	-	-	Desa Sijelling	Tellu Siattinge

Sumber : Bidang Sungai Danau dan Waduk. 2018.

Tabel 2.3. Embung Yang Telah Tersentuh Oleh Dana APBD Kabupaten Bone

No. Urut	Nama Bangunan	Luas Areal (ha)	Lokasi		Volume (m ³)
			Desa	Kecamatan	
1	2	3	5	6	7
1	Embung Lalepo	25	Lalepo	Kahu	0.040
2	Embung Ciborong I	25	Lalepo	Kahu	0.042
3	Embung Tibbo	50	Lalepo	Kahu	0.078
4	Embung Ciborong II	25	Lalepo	Kahu	0.042
5	Embung Pao	25	Pasaka	Kahu	0.045
6	Embung Tohonge	50	Pasaka	Kahu	0.078
7	Embung Mattoanging	70	Cammilo	Kahu	0.109
8	Embung Cakkela	25	Cakkela	Kahu	0.042
9	Embung Linre	70	Matajang	Kahu	0.110
10	Embung Laeba	25	Matajang	Kahu	0.041
11	Embung Lacekkeng Asu	25	Matajang	Kahu	0.043
12	Embung Lebbe	25	Matajang	Kahu	0.044
13	Embung Kajonga I	50	Biru	Kahu	0.079
14	Embung Kajonga II	25	Biru	Kahu	0.039
15	Embung Matuju	20	Biru	Kahu	0.033
16	Embung Waeputtang	25	Bontopadang	Kahu	0.045
17	Embung Maradda	50	Bontopadang	Kahu	0.078
18	Embung Tibbo	30	Bontopadang	Kahu	0.045
19	Embung Paranie	25	Bontopadang	Kahu	0.042
20	Waduk Poppai	200	Sanrego	Kahu	0.285
21	Embung Balle I	50	Balle	Kahu	0.080
22	Embung Balle II	25	Balle	Kahu	0.430
23	Embung Aletenga	30	Labuaja	Kahu	0.045
24	Embung Maggerang	100	Maggenrang	Kahu	0.141
25	Embung Camilo	30	Camilo	Kahu	0.470
26	Embung Matajang II	50	Matajang	Kahu	0.079
27	Embung Tompongpatu	25	Tompongpatu	Kahu	0.400
28	Embung Mario I	75	Bontojai	Bontocani	0.106
29	Embung Mario II	65	Bontojai	Bontocani	0.091
30	Embung Ceppaga	50	Bana	Bontocani	0.078

Tabel 2. 3. Lanjutan

1	2	3	5	6	7
31	Embung Paku	35	Bana	Bontocani	0.049
32	Embung Lalakke	50	Bulusirua	Bontocani	0.080
33	Embung Pemukiman	40	Poleonro	Libureng	0.056
34	Embung Wanuawaru	30	Wanuawaru	Libureng	0.045
35	Embung Labombo	50	Wanuawaru	Libureng	0.079
36	Embung Laboccing	30	Tappale	Libureng	0.047
37	Embung Tappale	50	Tappale	Libureng	0.080
38	Embung Pitumpidangnge	25	Pitumpidangnge	Libureng	0.040
39	Embung Tompobulu	20	Tompobulu	Libureng	0.035
40	Embung Lappa Galung	40	Tompobulu	Libureng	0.056
41	Embung Polewali	25	Polewali	Libureng	0.041
42	Embung Laburasseng	25	Laburasseng	Libureng	0.420
43	Embung Mallinrung I	50	Mallinrung	Libureng	0.080
44	Embung Bulu Ulaweng	50	Bulu Ulaweng	Patimpeng	0.081
45	Embung Gattareng	44	Gattareng	Salomekko	0.050
46	Embung Manera	50	Manera	Salomekko	0.078
47	Embung Lonrong	41	Abbumpungeng	Kajuara	0.058
48	Embung Waekecce	50	Waekeccce	Lappariaja	0.081
49	Embung Mattampawalie	100	Mattampawalie	Lappariaja	0.142
50	Embung Cangiloe	50	Mattampawalie	Lappariaja	0.078
51	Embung Cimellu	45	Tenri Pakkua	Lappariaja	0.064
52	Embung Bila-Bilae	40	Tonrongnge	Lappariaja	0.056
53	Embung Libukangnge	50	Tonrongnge	Lappariaja	0.079
54	Embung Tonrongnge	45	Tonrongnge	Lappariaja	0.064
55	Embung Talaga	45	Sengengpalie	Lappariaja	0.065
56	Embung Acicironge	30	Sengengpalie	Lappariaja	0.047
57	Embung Mappakkae	45	Sengengpalie	Lappariaja	0.065
58	Embung Bujung Cikke	40	Sengengpalie	Lappariaja	0.055
59	Embung Labaka	40	Sengengpalie	Lappariaja	0.057
60	Embung Lappa Majja	22	Padaelo	Lamuru	0.035
61	Embung Lompoe	40	Lalebata	Lamuru	0.056
62	Embung Ajangale	55	Turucinnae	Lamuru	0.085
63	Embung Poleonro	70	Poleonro	Ponre	0.099
64	Embung Allamengnge	50	Salampe	Ponre	0.080
65	Embung Bulu	70	Bulu	Bengo	0.099

Tabel 2. 3. Lanjutan

1	2	3	5	6	7
66	Embung Walimpong	519	Walimpong	Bengo	0.078
67	Embung Mattirowalie	56	Mattirowalie	Bengo	0.079
68	Embung Wessa	400	Liliriawang	Bengo	0.085
69	Embung Paccekkeng	83	Liliriawang	Bengo	0.117
70	Embung Toddang Jompi	427	Liliriawang	Bengo	0.600
71	Embung Usa	50	Usa	Palakka	0.078
72	Embung Siame	50	Siame	Palakka	0.078
73	Embung Atakka	80	Melle	Palakka	0.113
74	Embung Panyili	273	Panyili	Palakka	0.375
75	Embung Tanah Tenggara	25	Tanah Tenggara	Palakka	0.035
76	Embung Pasempe	153	Pasempe	Palakka	0.216
77	Embung Maccading	25	Tirong	Palakka	0.672
78	Embung Cani Sirenreng	100	Cani Sirenreng	Ulaweng	0.141
79	Embung Tadang Palie	70	Tadang Palie	Ulaweng	0.099
80	Embung Bake	90	Teamusu	Ulaweng	0.126
81	Embung Alinge	319	Teamusu	Ulaweng	0.449
82	Embung Tokeddu	58	Sappewalie	Ulaweng	0.082
83	Embung Cinnong	120	Sappewalie	Ulaweng	0.169
84	Embung Maduri	27	Sappewalie	Ulaweng	0.038
85	Embung Bukku	97	Mulamenre'e	Ulaweng	0.136
86	Embung Wanga	50	Mulamenre'e	Ulaweng	0.060
87	Embung Sura	110	Lilina Ajangale	Ulaweng	0.155
88	Embung Waetuo	102	Timusu	Ulaweng	0.143
89	Embung Pandangnge	50	Timusu	Ulaweng	0.078
90	Embung Welareng/Walenreng	226	Ulaweng Cinnong	Ulaweng	0.318
91	Embung Katapang	49	Ulaweng Cinnong	Ulaweng	0.069
92	Embung Gilingeng	35	Ulaweng Cinnong	Ulaweng	0.049
93	Embung Weddie	69	Pallawarukka	Ulaweng	0.086
94	Embung Cempaniga	210	Bacu	Barebbo	0.295
95	Embung Wollangi I	463	Wollangi	Barebbo	0.521
96	Embung Calirung	542	Lampoko	Barebbo	0.563
97	Embung Congko	150	Congko	Barebbo	0.189
98	Embung Taretta	337	Waeputtange	Amali	0.944
99	Embung Massakki	40	Taccipong	Amali	0.056
100	Embung Maccading	25	Tirong	Palakka	0.448

Tabel 2. 3. Lanjutan (selesai)

1	2	3	5	6	7
101	Embung Tojang	25	Tirong	Palakka	0.035
102	Embung Palio	30	Tirong	Palakka	0.042
103	Embung Jampu	20	Tirong	Palakka	0.028
104	Embung Cenrana	20	Tirong	Palakka	0.030
105	Embung Cellu	45	Kel. Cellu	Tanete Riattang	0.063
106	Embung Padang	25	Kel. Majang	Tanete Riattang Barat	0.035
107	Embung Data	25	Kel. Majang	Tanete Riattang Barat	0.042
108	Embung Opo	50	Opo	Ajangngale	0.078
109	Embung Itterung	252	Itterung	Tellu Siattingnge	0.354
110	Embung Tajong	230	Tajong	Tellu Siattingnge	0.323
111	Embung Otting	20	Otting	Tellu Siattingnge	0.028
112	Embung Laccori	50	Laccori	Dua Boccoe	0.079
113	Embung To Cina	300	To Cina	Dua Boccoe	0.422
114	Embung Lacenno	70	Mario	Dua Boccoe	0.098
115	Embung Sailong	350	Sailong	Dua Boccoe	0.492
116	Embung Paccing	286	Paccing	Awangpone	0.127
117	Embung Tellongeng	50	Tellongeng	Mare	0.080
118	Embung Jampalenna	65	Cinnong	Sibulue	0.091
119	Embung Tempe-Tempe	400	Polewali	Sibulue	0.563
120	Embung Kawerang	146	Kawerang	Cina	0.240
121	Embung Leccemme	50	Walenreng	Cina	0.081
122	Embung Barereng	226	Walenreng	Cina	0.135
123	Embung Mannagae	67	Padangloang	Cina	0.086
124	Embung Sabila	262	Padangloang	Cina	0.295
125	Embung Tanete	100	Kel. Tanete	Cina	0.141
126	Embung Carengke	130	Kel. Tanete	Cina	0.183
127	Embung Ulu Bubung	200	Lompu	Cina	0.281
128	Embung Bubung Loang	50	Samaelo	Cina	0.168
129	Embung Kanna	50	Lampoko	Barebbo	0.070

Sumber : Bidang Sungai Danau dan Waduk. 2018.

Tabel 2.4. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bone Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	LOKASI		TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KECAMATAN	DESA	
1	2	6	3	4	5
1	D.I. AJJALIRENG	150	TELLU SIATTINGNGE	AJJALIRENG	1996
2	D.I. ALINGE	319	ULAWENG	TEAMUSU	1995
3	D.I. ANGASANGNGE	120	LAPPARIAJA	LILIRIATTANG	1995
4	D.I. APANGNGE	60	TELLU LIMPOE	GAYA BARU	1996
5	D.I. ATAKKA	80	PALAKKA	MELLE	1995
6	D.I. BENDUNG BATUA	120	CINA	KAWERANG	1996
7	D.I. BAKE	90	ULAWENG	TEAMUSU	1995
8	D.I. BALUBU	120	BENGO	MATTIROWALIE	1995
9	D.I. BANA	100	BONTOCANI	BANA	1996
10	D.I. BANA I/LAPAO	94	LAPPARIAJA	MATTAMPAWALIE	1996
11	D.I. BARUGAE	102	LAMURU	BARUGAE	1996
12	D.I. BONTOJAI	306	BONTOCANI	BONTOCANI	1996
13	D.I. BOTTO	58	TELLU SIATTINGNGE	PADA IDI	1996
14	D.I. BUKKU	97	ULAWENG	MULAMENREE	1996
15	D.I. BULO	150	LAPPARIAJA	MATTAMPAWALIE	1987
16	D.I. CAKULO	60	AMALI	TOCINNONG	1995
17	D.I. CAKO	100	LAPPARIAJA	SENGENPALIE	1990
18	D.I. CALIMPONG	100	LAPPARIAJA	TENRI PAKKUA	1996
19	D.I. CALIRUNG	542	BAREBBO	LAMPOKO	1987
20	D.I. CEMPANIGA	210	BAREBBO	BACU	1995
21	D.I. CENRANA	200	MARE	TELLONGENG	1990
22	D.I. CINNONG	120	ULAWENG	SAPPE WALIE	1996
23	D.I. CIROWALI	270	BAREBBO	CORAWALI	1981
24	D.I. CONGKO	150	PALAKKA	CONGKO	1996
25	D.I. COPPO MELLE	53	AMALI	TOCINNONG	1996
26	D.I. CUCCORO/CELLIE	76	PALAKKA	URENG	1996
27	D.I. DEKKO	286	PONRE	MAPPESANGKA	1995
28	D.I. GALUNG I	109	ULAWENG	MULAMENREE	1996
29	D.I. GALUNG II	86	ULAWENG	GALUNG	1996
30	D.I. GATTARENG	44	PATIMPENG	GATTARENG	1998
31	D.I. GONA	100	KAJUARA	GONA	1995
32	D.I. INRU	240	BENGO	TUNGKE	1998
33	D.I. ITTERUNG	252	TELLU SIATTINGNGE	ITTERUNG	1995
34	D.I. JEMPO	200	LAPPARIAJA	SENGENPALIE	1996
35	D.I. KADUPPAE/TODDANG LEMPANG	76	LIBURENG	TOMPO BULU	1995
36	D.I. KAHU	60	BONTOCANI	KAHU	1999
37	D.I. KALU	216	BENGO	LILIRIAWANG	1995
38	D.I. KANANGO	60	ULAWENG	GALUNG	1995
39	D.I. KARANGENG / PADANG LOANG	150	LAMURU	MATTAMPA BULU	1995
40	D.I. KAROPPA	146	PONRE	TURUADAE	1995

Tabel 2. 4. Lanjutan

1	2	6	3	4	5
41	D.I. KATAPANG II	100	AMALI	TOCINNONG	1995
42	D.I. KAWERANG	146	CINA	KAWERANG	1996
43	D.I. KUNANG	52	BONTOCANI	LANGI	1987
44	D.I. LABONE	330	LAPPARIAJA	TENRI PAKKUA	1995
45	D.I. LACCORI	130	DUA BOCCOE	LACCORI	1995
46	D.I. LACEMME	175	CINA	WALENRENG	1996
47	D.I. LAJANG - LAJANG	119	LAPPARIAJA	SENGENPALIE	1996
48	D.I. LALIDDONG	158	BAREBBO	KAJAOLALIDDONG	1995
49	D.I. LAPINCE	70	LAMURU	MATTAMPA BULU	1995
50	D.I. LAPP JUPENG	150	BENGO	BENGO	1996
51	D.I. LAPP PORO	100	BONTOCANI	MATTIROWALIE	1995
52	D.I. LAPP TALLE	206	LAPPARIAJA	MATTAMPAWALIE	1995
53	D.I. LAPUTENG	297	TONRA	LIBURENG	1996
54	D.I. LASINA	140	LAMURU	LALABATA	1996
55	D.I. LEKO BALLO	227	LAMURU	LALABATA	1996
56	D.I. LERANG	100	CINA	ABBUMPUNGENG	1908
57	D.I. LONRONG	100	KAJUARA	ABBUMPUNGENG	1995
58	D.I. LONRU	75	BENGO	MATTIROWALIE	1995
59	D.I. MADDEWATAE	60	TELLU SIATTINGNGE	PALONGKI	1996
60	D.I. MALAKA	200	BENGO	MATTIROWALIE	1996
61	D.I. MALAKA II	220	BENGO	MATTIROWALIE	1995
62	D.I. MALLINRUNG	464	LIBURENG	MALLINRUNG	1996
63	D.I. MANNAGAE	67	CINA	PADANG LOANG	1997
64	D.I. MANNERA	150	SALOMEKKO	MANNERA	1996
65	D.I. MAROANGING	110	PATIMPENG	TALABANGI	1995
66	D.I. MELLE	310	PALAKKA	MELLE	1996
67	D.I. MICO	83	PALAKKA	MICO	1997
68	D.I. MONCONG	82	LAPPARIAJA	MATTIROWALIE	1999
69	D.I. PACCING	286	AWANGPONE	PACCING	1996
70	D.I. PACEKKENG	83	BENGO	LILIRIAWANG	1995
71	D.I. PADA IDI	77	TELLU SIATTINGNGE	PADA IDI	1996
72	D.I. PADANG LAMPE	146	LAPPARIAJA	TENRI PAKKUA	1996
73	D.I. PADANG TENGNGAE	100	BENGO	TUNGKE	1995
74	D.I. PALLENGORENG	552	TANETE RIATTANG	BIRU	1996
75	D.I. PALONGKI	70	LAMURU	BARAKKAE	1997
76	D.I. PALONGKI I	83	TELLU SIATTINGNGE	PALONGKI	1997
77	D.I. PAMMUSURENG	110	BONTOCANI	KEL. KAHU	1995
78	D.I. PANNAMPUNG	109	ULAWENG	TIMUSU	1998
79	D.I. PANGISORENG	217	CINA	ABBUMPUNGENG	1996
80	D.I. PANYILI	273	PALAKKA	PANYILI	1995
81	D.I. PARANGENG II	500	CENRANA	LEBONGNGE	1996
82	D.I. PARIGI	137	LAPPARIAJA	PARIGI	1997
83	D.I. PASEMPE	153	PALAKKA	PASEMPE	1996
84	D.I. PATIONGI	150	CINA	CINENNUNG	1996
85	D.I. PATTIMPA	144	PONRE	SALEBBA	1995
86	D.I. PATTUKU	155	BONTOCANI	PATTUKU	1996
87	D.I. PISING	97	LAMURU	MATTAMPAWALIE	1997
88	D.I. PONRO LIBURENG	70	BENGO	SELLI	1990
89	D.I. RABUA	250	TELLU LIMPOE	TONDONG BUA	1996
90	D.I. RAJA	370	LAPPARIAJA	MATTAMPAWALIE	1995

Tabel 2. 4. Lanjutan

1	2	6	3	4	5
91	D.I. RAPP A	120	TONRA	RAPP A	1996
92	D.I. SABILA I	262	CINA	PADANG LOANG	1997
93	D.I. SABILA II	100	CINA	PADANG LOANG	1996
94	D.I. SAILONG	350	DUA BOCCOE	SAILONG	1996
95	D.I. SAMAGORA	158	LAPPARIAJA	TONRONGNGE	1996
96	D.I. SIJELLING	161	TELLU SIATTINGNGE	SIJELLING	1996
97	D.I. SOGA	95	CINA	KANCO	1996
98	D.I. SOLORENG	286	LAMURU	LALEBATA	1994
99	D.I. SUR A	110	ULAWENG	LILINA AJANGALE	1996
100	D.I. TALABANGI I	54	PATIMPENG	TALABANGI	1996
101	D.I. TABBE WALIE	148	ULAWENG	CANI SIDENRENG	1996
102	D.I. TADDAGAE	113	CINA	WALENRENG	1996
103	D.I. TAJONG	230	TELLU SIATTINGNGE	TAJONG	1996
104	D.I. TAJONG I	184	TELLU SIATTINGNGE	PALONGKI	1996
105	D.I. TALABANGI II	80	PATIMPENG	TALABANGI	1996
106	D.I. TALABANGI III	50	PATIMPENG	TALABANGI	1998
107	D.I. TANETE	100	CINA	LURAH T. HARAPAN	1996
108	D.I. TANETE BUANG	343	PALAKKA	MATTANETE BUA	1977
109	D.I. TARETTA	337	AMALI	WAEMPUTTANGNGE	1981
110	D.I. TAROGI	200	LAPPARIAJA	SENGENGPALIE	1996
111	D.I. TELLONGENG	165	MARE	TELLONGENG	1999
112	D.I. TEMPE - TEMPE	400	SIBULUE	POLEWALI	1996
113	D.I. TEPP O TAE	62	ULAWENG	TEAMUSU	1996
114	D.I. TOBEMPA	129	LAPPARIAJA	MATTAMPAWALIE	1995
115	D.I. TO CINA	300	DUA BOCCOE	TO CINA	1996
116	D.I. TODDANG JOMPI	427	BENGO	LILIRIAWANG	1995
117	D.I. TOKEDDU	58	ULAWENG	SAPPE WALIE	1996
118	D.I. TOLAGA / TALAGA	187	LAPPARIAJA	SENGENGPALIE	1997
119	D.I. TORAGI / BARAKKAE	200	LAMURU	BARAKKAE	1996
120	D.I. TUANGLEO I	250	CENRANA	TAWAROE	1996
121	D.I. ULOE I	500	DUA BOCCOE	KEL. UNYI	1995
122	D.I. ULOE II	400	DUA BOCCOE	ULO E	1996
123	D.I. ULU BUBUNG	200	CINA	LOMPU	1997
124	D.I. UNRA	76	AWANGPONE	UNRA	1996
125	D.I. WAELENNAE	135	TELLU SIATTINGNGE	TAJONG	1997
126	D.I. WAETUO	102	ULAWENG	TIMUSU	1996
127	D.I. WALENRANG / WELARENG	209	ULAWENG	ULAWENG CINNONG	1995
128	D.I. WALENRENG	226	CINA	WALENRENG	1997
129	D.I. WALIMPONG	519	BENGO	WALIMPONG	1996
130	D.I. WATANG CANI	188	BONTOCANI	WATANGCANI	1997

Tabel 2. 4. Lanjutan

1	2	6	3	4	5
131	D.I. WEDDIE	69	ULAWENG	PALLAWARUKKA	1996
132	D.I. WESSA	400	BENGO	LILIRIAWANG	1996
133	D.I. WOLLANGI	463	BAREBBO	WOLLANGI	1978
134	D.I. WOLLANGI II	94	BAREBBO	WOLLANGI	1996
135	D.I. AJANGALE	40	LAMURU	TURUCINNAE	1996
136	D.I. GALUNG III	50	ULAWENG	GALUNG	1996
137	D.I. AJASSAO	50	LIBURENG	BARINGENG	1996
138	D.I. AKO BANGE	90	LAPPARIAJA	LILIRIATTANG	1995
139	D.I. ALLAMENGNGE	100	PONRE	SALAMPE	1996
140	D.I. ALLEMPONGENGNGE	200	BENGO	TUNGKE	1997
141	D.I. ASSIRAJANGE	100	LAPPARIAJA	MATTAMPAWALIE	1996
142	D.I. BARERENG	226	CINA	WALENRENG	1995
143	D.I. BATU - BATU/ELLE	80	TELLU LIMPOE	BONTO MASUNGGU	1996
144	D.I. BATUA	80	TELLU SIATTINGNGE	SIJELLING	1997
145	D.I. BATUPUTIH	80	TELLU LIMPOE	BATU PUTIH	1996
146	D.I. BILA	200	TELLU LIMPOE	GAYA BARU	1995
147	D.I. BT.MASUNGGU	250	TELLU LIMPOE	BONTO MASUNGGU	1996
148	D.I. BULU PARE'E	150	LAMURU	MATTAMPA BULU	1996
149	D.I. BULU - BULU	435	TONRA	BULU-BULU	1997
150	D.I. BULUSIRUA	58	BONTOCANI	BULU SIRUA	1995
151	D.I. BULUTUNGKE	100	LAPPARIAJA	TENRI PAKKUA	1996
152	D.I. CALIMA	125	PONRE	MATTAMPAE	1997
153	D.I. CAMILO	150	KAHU	CAMILO	1996
154	D.I. CARENGKE	130	CINA	LURAH T. HARAPAN	1995
155	D.I. CIMELLU	70	LAPPARIAJA	TENRI PAKKUA	1996
156	D.I. COMPONGE	200	TELLU SIATTINGNGE	ULO-ULO	1997
157	D.I. DEWATAE	70	ULAWENG	TADANG PALIE	1996
158	D.I. ERE CINNONG	250	BONTOCANI	ERE CINNONG	1995
159	D.I. GALUNG LANGI	30	LAMURU	MATTAMPA BULU	1997
160	D.I. GANJA / SALO TELLUE	110	BAREBBO	WATU	1996
161	D.I. IPIE	35	TELLU SIATTINGNGE	PALONGKI	1995
162	D.I. JAMPU	80	TELLU SIATTINGNGE	SIJELLING	1996
163	D.I. JERAE	114	PONRE	PATIMPA	1997
164	D.I. JOMPENG	200	TELLU SIATTINGNGE	SIJELLING	1996
165	D.I. KALOBBAE	50	LAPPARIAJA	TENRI PAKKUA	1995
166	D.I. KATAPANG	49	ULAWENG	TEAMUSU	1996
167	D.I. LACENNO	70	DUA BOCCOE	MARIO	1997
168	D.I. LACORI / BATU LAPPA	50	LAPPARIAJA	SENGENPALIE	1996
169	D.I. LALOMPENG	80	LAMURU	MATTAMPA BULU	1995
170	D.I. LAMONCONG	100	BONTOCANI	LAMONCONG	1996
171	D.I. LANGI	300	BONTOCANI	LANGI	1997
172	D.I. LAPPA GALUNG	50	LIBURENG	TOMPO BULU	1996
173	D.I. LAPPA KANRUNG	200	BONTOCANI	MATTIROWALIE	1995
174	D.I. LAPPAPAO BEDDA	75	LAMURU	MAMMINASAE	1996
175	D.I. LAWARA	80	LAMURU	BARUGAE	1997
176	D.I. LEMPANG	140	LAPPARIAJA	TONRONGNGE	1996
177	D.I. LIBUKANGE	75	LAMURU	MATTAMPA BULU	1995
178	D.I. LOMPU	150	CINA	LOMPU	1996
179	D.I. LONRONG	90	PONRE	PATTIMPA	1997
180	D.I. LOPPA	70	TELLU LIMPOE	POLEWALI	1996

Tabel 2. 4. Lanjutan (selesai)

1	2	6	3	4	5
181	D.I. MALONGKA / LAMACENG	70	LAMURU	SENGENPALIE	1997
182	D.I. MALLINRUNG I	150	LIBURENG	MALLINRUNG	1996
183	D.I. MASSAPAE	150	LAMURU	MATTAMPA BULU	1996
184	D.I. MASSAPAE	50	LAMURU	MATTAMPA BULU	1996
185	D.I. MAMMINASAE	76	LAMURU	MAMMINASAE	1996
186	D.I. MAGENRANG	100	KAHU	MAGGENRANG	1995
187	D.I. NAGAE / MASSAPAE	150	TELLU LIMPOE	GAYA BARU	1995
188	D.I. OTTING	20	TELLU SIATTINGNGE	OTTING	1997
189	D.I. PADANGLOANG	150	LAMURU	MATTAMPA BULU	1996
190	D.I. PALACARI	80	PONRE	SALEBBA	1995
191	D.I. PALONGKI II	51	TELLU SIATTINGNGE	PALONGKI	1996
192	D.I. PANDANGNGE	50	ULAWENG	TIMUSU	1997
193	D.I. PASEMPE I	50	PALAKKA	PASEMPE	1995
194	D.I. PASSAPPARENG	50	LAMURU	MASSENRENGPULU	1996
195	D.I. PATTUKU LIMPOE	80	LAPPARIAJA	PATTUKU LIMPOE	1997
196	D.I. PANYILI II	50	PALAKKA	PANYILI	1996
197	D.I. PERANGENG	200	CENRANA	WATANG CENRANA	1996
198	D.I. POLEONRO	70	PONRE	POLEONRO	1995
199	D.I. PONRE - PONRE	500	LIBURENG	PONRE-PONRE	1996
200	D.I. RUMPIA	270	KAHU	MATAJANG	1997
201	D.I. SAMAENRE	74	TELLU LIMPOE	SAMAENRE	1996
202	D.I. SIAME	45	PALAKKA	SIAME	1995
203	D.I. SOGA I	150	CINA	KANCO	1996
204	D.I. TANAH TENGAH	60	LIBURENG	BARINGENG	1997
205	D.I. TANGKULU	150	BONTOCANI	WATANGCANI	1996
206	D.I. TAPAMPANG / DATA	60	TELLU LIMPOE	POLEWALI	1995
207	D.I. TAPONG	80	TELLU LIMPOE	TAPONG	1996
208	D.I. TAPPARENG	100	TELLU SIATTINGNGE	SIJELLING	1997
209	D.I. TELLANGKERE	102	TELLU LIMPOE	TELLANGKERE	1996
210	D.I. TELLU BOCCOE	110	PONRE	TELLU BOCCOE	1995
211	D.I. TELLU LIPUE	65	LAMURU	MATTAMPA BULU	1996
212	D.I. TEPPAE	150	LAPPARIAJA	PATTUKU LIMPOE	1997
213	D.I. TOCUMA	75	TELLU SIATTINGNGE	AJJALIRENG	1996
214	D.I. TOMPO BARUTTUNG	50	LAMURU	PADAELO	1995
215	D.I. TOMPO BULU	105	LIBURENG	TOMPO BULU	1996
216	D.I. TONDONG BUA	120	TELLU LIMPOE	TONDONG BUA	1997
217	D.I. TONRONGNGE	175	LAPPARIAJA	TONRONGNGE	1996
218	D.I. TORAGI	200	LAMURU	MATTAMPA BULU	1995
219	D.I. TORETTE / MATTAMPAWALIE	100	LAMURU	MATTAMPAWALIE	1997
220	D.I. TUANGLEO	350	CENRANA	TAWAROE	1996
221	D.I. TUANGLEO II	300	CENRANA	TAWAROE	1995
222	D.I. ULAWENG	100	LAPPARIAJA	TENRI PAKKUA	1996
223	D.I. WANGA	50	ULAWENG	MULAMENREE	1997
224	D.I. WOLLANGI III	94	BAREBBO	WOLLANGI	1996

Sumber : Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015.

Ringkasan aset, sarana dan prasarana sumber daya air yang ada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Aset, Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air di Kabupaten Bone Hingga Tahun 2017

No	Aset, Sarana, Prasarana	Jenis	Keterangan
1	Bangunan Utama	Bendung; Embung; Kolam Mata Air	265 Buah
2	Bangunan Pembagi Air	Bagi; Bagi Sadap; Sadap	907 Buah
3	Bangunan Pengatur Air	Pintu Air	33 Buah
4	Bangunan Pelengkap	Talang; Pelimpah; Gorong-Gorong; Jembatan; Jembatan Hewan	369 Buah
5	Saluran Pembawa	Induk	336.222 M
		Sekunder	74.979 M
		Tersier	-
7	Bangunan Pengendali Banjir	Tanggul Pantai	112 M
		Perkuatan Tebing (Bronjong, Pasangan Batu)	8.717 M

Sumber : Bidang Sungai Danau & Waduk. 2018; Bidang Irigasi Rawa Pantai & Air Baku. 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2013-2017

Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Untuk pelayanan di bidang pekerjaan umum, indikator yang sering digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan tersebut ada 3 (tiga), yaitu: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan/atau *Millenium Development Goal's (MDG's)*. Terkait dengan pencapaian kinerjanya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone menggunakan 2 indikator SPM, yakni persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan rasio jaringan irigasi, disamping indikator program (*outcome*) dan indikator kegiatan (*output*) dari Renstra ini sendiri. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Tabel T-C.23.)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Satuan	Target SPM	Target Renstra Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[(10)/(5)]]*100%	(16)=[(11)/(6)]]*100%	(17)=[(12)/(7)]]*100%	(18)=[(13)/(8)]]*100%	(19)=[(14)/(9)]* 100%
BIDANG SUMBER DAYA AIR (2013 - 2016)																		
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																	
a.	Terbangunnya fasilitas penangkaran sumber-sumber air (embung, kolam, cekdam).	Unit	-	-	-	-	-	-	5	5	7	2	-	-	-	-	-	-
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya																	
a.	Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	-	87.464 Km	131.626 Km	175.788 Km	457.951 Km	Beralih Ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	10.590 Km	11.540 Km	8.960 Km	38.450 Km	Beralih Ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	12.11%	8.77%	5.10%	8.40%	Beralih Ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
b.	Terpeliharanya/terehabilitasi bantaran dan tanggul sungai	Km	-	-	-	-	-		0.710	3.902	1.591	0.310						
c.	Terbersihkan/terkeruknya sungai/kali	Km	-	-	-	-	-		0.350	5.150	1.230	2.101						
d.	Terbangunnya pintu air irigasi	Buah	-	-	-	-	-		15	11	6	-						
d.	Rasio jaringan irigasi	M/Ha	-	-	-	-	-		2.450 Km	2.300 Km	3.250 Km	10.160 Km						
3	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku																	
a.	Terbangunnya Sumur-Sumur Air Tanah (SAT)	Unit	-	-	-	-	-		-	-	2	1						
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (2017 dst.)																		
1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (2 Program)																	
a.	Terbangunnya fasilitas penangkaran sumber-sumber air (embung, kolam, cekdam).	Unit	-															
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya																	
a.	Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	-	Bidang Sumber Daya Air					Bidang Sumber Daya Air					Bidang Sumber Daya Air				
b.	Terpeliharanya/terehabilitasi bantaran dan tanggul sungai	Km	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air				264.113 Km	Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air				10.640 Km	Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air				4.03%
c.	Terbersihkan/terkeruknya sungai/kali	Km	-															
d.	Terbangunnya pintu air irigasi	Buah	-															
d.	Rasio jaringan irigasi	M/Ha	-															
3	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku																	
a.	Terbangunnya Sumur-Sumur Air Tanah (SAT)	Unit	-															
4	Program Penyelenggaraan Irigasi																	
a.	Pengelolaan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2)	Dokumen	-															

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kabupaten Bone 2013-2018; Laporan LPPD Tahun 2017 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.

Dari Dari Tabel 2.6 atau Tabel T-C.23. nampak bahwa di Tahun 2013 – 2016 Renstra yang ada merupakan rencana kerja strategis dari Bidang Sumber Daya Air yang merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, sementara di Tahun 2017 merupakan penyempurnaan waktu Renstra 5 (lima) Tahunan yang bermula di Tahun 2013. Di Tahun 2017 tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sudah terbentuk dan berdiri sendiri sebagaimana telah dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 62).

Pun demikian dari Tabel 2.6 atau Tabel T-C.23, dapat dilihat bahwasanya parameter maupun hasil nilai dari Kolom Target Renstra Pada Tahun Ke-1 (2013) – Tahun Ke-5 (2017) yang dikutip dari Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2013-2017, tidak sejalan dan tidak selaras dengan parameter dan nilai yang tertuang di Kolom Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-1 (2013) – Tahun Ke-5 (2017) yang disadur dari Laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah (LPPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2017. Hal ini diakibatkan kurangnya atau bahkan mungkin tidak adanya proses cek dan ricek terhadap kedua dokumen rujukan tersebut, sehingga memungkinkan adanya faktor koreksi dan revisi terhadap kebenaran atau kesesuaian penyusunan Dokumen Renstra tersebut dengan petunjuk teknis dan aturan yang ada terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen yang dimaksud. Untuk itu dalam upaya menyelaraskan antara target dan capaian Renstra ini maka Tabel 2.6. dimodifikasi sebagaimana yang ditampilkan di atas.

Dari tabel nampak pula bahwa pada Kolom Target Renstra hanya tertuang 1 (satu) kegiatan sementara pada Kolom Realisasi Capaian Renstra terdapat 5 (lima) item kegiatan. Dari tabel pula dapat dibaca bahwa realisasi capaian Renstra untuk indikator persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi

baik sangat jauh dari yang ditargetkan. Demikian pula trend pencapaian realisasi selama Tahun 2013 – Tahun 2017 yang cenderung naik turun tidak berbanding lurus dengan trend peningkatan targetnya yang cenderung naik terus dari tahun ke tahun. Demikian pula gap pencapaian realisasi dan target tiap tahunnya masih tergolong jauh yang dibuktikan dengan angka persentase rasio realisasi capaian dengan yang ditargetkan masih terbilang kecil (kurang baik). terjadinya fenomena seperti yang disebutkan di atas boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Perencanaan yang tidak akurat;
2. Perumusan target yang tidak dan atau kurang mempertimbangkan alokasi anggaran di tahun-tahun sebelumnya;
3. Ketidak stabilan pendapatan daerah yang berimbas pada pengalokasian anggaran yang tidak berimbang dan cenderung tidak pasti (tidak tetap) dari tahun ke tahun.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Tabel T-C.24.)

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pendanaan Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		Keterangan	
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	$\frac{(13)-(8)/(3)}{100\%}$	$\frac{(14)-(9)/(4)}{100\%}$	$\frac{(15)-(10)/(5)}{100\%}$	$\frac{(16)-(11)/(6)}{100\%}$	$\frac{(17)-(12)/(7)}{100\%}$	(18)	(19)	(20)	
BIDANG SUMBER DAYA AIR (2013 - 2016)		13,786,855,825.00	22,545,163,150.00	22,729,447,362.00	50,874,088,700.00	-	12,033,917,975.00	20,910,077,988.00	21,960,899,762.00	42,097,818,100.00	-	87.29%	92.75%	96.62%	82.75%	-	62.72%	56.83%	2013-2016	
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	964,447,000.00	1,069,124,000.00	1,239,546,000.00	625,940,000.00		881,479,500.00	997,944,000.00	1,212,779,000.00	599,810,750.00		91.40%	93.34%	97.84%	95.83%		-7.57%	-5.27%	2013-2016	
a.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	964,447,000.00	1,069,124,000.00	1,239,546,000.00	625,940,000.00		881,479,500.00	997,944,000.00	1,212,779,000.00	599,810,750.00		91.40%	93.34%	97.84%	95.83%		-7.57%	-5.27%	2013-2016	
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	12,822,408,825.00	21,476,039,150.00	20,990,343,362.00	49,917,350,800.00		11,152,438,475.00	19,912,133,988.00	20,373,905,662.00	41,190,018,350.00		86.98%	92.72%	97.06%	82.52%		67.68%	61.01%	2013-2016	
a.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	11,301,931,325.00	12,887,196,150.00	11,299,326,362.00	36,655,872,400.00	Beralih Ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	9,815,244,875.00	11,768,260,488.00	10,814,661,462.00	28,771,027,200.00	Beralih Ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	86.85%	91.32%	95.71%	78.49%	Beralih Ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	75.37%	59.28%	2013-2016	
b.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	1,119,051,000.00	7,284,343,000.00	4,029,588,500.00	1,424,520,900.00		1,055,221,000.00	6,977,935,500.00	3,972,723,600.00	1,353,351,750.00		94.30%	95.79%	98.59%	95.00%		147.20%	150.76%	2013-2016	
c.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	401,426,500.00	1,304,500,000.00	1,695,160,500.00	429,621,500.00		281,972,600.00	1,165,938,000.00	1,673,618,000.00	342,100,000.00		70.24%	89.38%	98.73%	79.63%		60.09%	92.49%	2013-2016	
d.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	-	-	3,966,268,000.00	11,407,336,000.00		-	-	3,912,902,600.00	10,723,539,400.00		-	-	-	98.65%		94.01%	187.61%	174.06%	2015-2016
3	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	-	-	499,558,000.00	330,797,900.00			-	-	374,215,100.00		307,989,000.00		-	-		74.91%	93.10%		-33.78%
a.	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	-	-	499,558,000.00	330,797,900.00		-	-	374,215,100.00	307,989,000.00		-	-	74.91%	93.10%	-33.78%	-17.70%	2015-2016		
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (2017 dst.)		-	-	-	-	41,916,825,600.00	-	-	-	-	40,744,424,650.00	-	-	-	-	97.20%	-	-	-	
1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (2 Program)					859,766,250.00					849,869,250.00					98.85%	3.66%	6.47%	2013-2017	
a.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air					859,766,250.00					849,869,250.00					98.85%	3.66%	6.47%	2013-2017	
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					40,865,630,450.00					39,871,747,500.00					97.57%	46.23%	44.96%	2013-2017	
a.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi					11,612,820,500.00					11,444,629,350.00					98.55%	39.45%	29.40%	2013-2017	
b.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai					10,977,518,150.00					10,749,366,400.00					97.92%	278.06%	286.64%	2013-2017	
c.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun					797,861,000.00					764,583,500.00					95.83%	66.49%	100.24%	2013-2017	
d.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi					17,477,430,800.00					16,913,168,250.00					96.77%	120.41%	115.89%	2015-2017	
3	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku					22,807,900.00					22,807,900.00					100.00%	-63.44%	-55.15%	2015-2017	
a.	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah					22,807,900.00					22,807,900.00					100.00%	-63.44%	-55.15%	2015-2017	
4	Program Penyelenggaraan Irigasi					168,621,000.00					-					-	-	-	2017	
a.	Pengelolaan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2)					168,621,000.00					-					-	-	-	2017	

Sumber : Laporan Keuangan dan Fisik Tahun 2013-2016. Dinas PU dan SDA; Laporan Keuangan dan Fisik Tahun 2017 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone disajikan dalam Tabel 2.7 (Tabel T-C.24). Secara umum tingkat realisasi anggaran dari Tahun 2013-2016 saat masih berstatus Bidang Sumber Daya Air hingga setelah menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2017 tergolong tinggi dan baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya rasio realisasi dan anggaran di tiap tahunnya yakni rata-rata di atas 80%, baik saat masih berstatus bidang maupun setelah berdiri sendiri jadi dinas tersendiri. Rata-rata pertumbuhan anggaran saat masih berstatus bidang selama kurun waktu 2013-2016 sebesar 62.72% dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendanaan sebesar 56.83%. Adanya selisih antara anggaran dan realisasi pendanaan umumnya dipicu oleh adanya dana retensi dari pekerjaan-pekerjaan konstruksi (belanja modal) yang belum dicairkan saat pekerjaan telah selesai melainkan menunggu masa pemeliharaan berakhir (enam pasca serah terima awal pekerjaan) yang umumnya melampaui tahun anggaran berjalan.

Nampak pula dari tabel di atas bahwa saat masih berstatus bidang, alokasi dan serapan anggaran terbesar selama kurun waktu 2013-2016 disumbang oleh Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, disusul oleh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam lalu kemudian Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Sementara di tahun 2017 ketika sudah menjadi dinas tersendiri, alokasi dan serapan anggaran terbesar masih disumbang oleh Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; lalu disusul oleh Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; lalu Program Penyelenggaraan Irigasi dan Program Pengadaan dan Pengolahan Air Baku.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Tantangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten bone semakin berat dan kompleks, beberapa tantangan ke depan antara lain :

1. Semakin besarnya potensi konflik antar pengguna air.
2. Masih kurangnya peran serta/kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air.
3. Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi *inflow* air yang masuk ke waduk/embung/bending sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air.
4. Semakin menurunnya kualitas air karena banyaknya pencemaran air.
5. Adanya potensi masalah rob dan limpasan air laut di beberapa daerah kawasan pantai yang ada di Kabupaten Bone
6. Pengelolaan sumber daya air tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan.
7. Prinsip pengelolaan sumber daya air memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan.
8. Tingkat kemiskinan masyarakat khususnya masyarakat tani yang masih tergolong tinggi.

Adapun peluang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten bone dalam mengembangkan pelayanannya diantaranya :

1. Adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air.
2. Adanya potensi sumber daya air yang besar.
3. Masih banyaknya potensi daerah-daerah irigasi baru yang bisa dibangun dan dikembangkan.
4. Adanya kebutuhan air dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.
5. Adanya bantuan dana transfer dari Pusat melalui mekanisme DAK.
6. Adanya kerja sama yang baik dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompeangan Jeneberang.
7. Adanya peninjauan kembali produk hukum RTRWP dan RTRW Kabupaten Bone yang memungkinkan perubahan-perubahan kawasan pertanian produktif yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bone.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang ada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air baik mengenai tugas pokok dan fungsinya masing – masing maupun tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut.
2. Kurangnya fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) dalam menanggulangi luapan dan banjir rob yang terjadi baik di daerah-daerah pemukiman maupun di kawasan-kawasan produktif yang ada di daerah-daerah pantai tersebut akibat adanya fluktuasi pasang surut air laut di daerah-daerah pantai (kawasan pesisir) yang ada di Kabupaten Bone yang cenderung tidak menentu baik disebabkan pengaruh inkonsistensi iklim maupun pengaruh pemanasan global.
3. Banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang rawan longsor akibat pengaruh erosi banjir dan ketidak stabilan lereng yang berpotensi mengganggu keseimbangan pengaliran sungai maupun dapat membahayakan fasilitas-fasilitas sumber daya air yang ada di sekitarnya.
4. Banyaknya sungai utama yang mengalami laju aggradasi (pendangkalan dasar sungai oleh sedimen) yang mengurangi kapasitas

pengaliran sungai yang berpotensi menyebabkan banjir.

5. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian banjir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
6. Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air untuk keperluan irigasi.
7. Adanya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan.
8. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
9. Masih kurangnya bangunan/fasilitas penangkar/konservasi air tanah yang terbangun.
10. Banyaknya bangunan-bangunan utama (pengambilan, pembagi, penguras) yang belum dilengkapi dengan pintu air.
11. Masih adanya jaringan irigasi yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
12. Adanya bangunan pintu air yang mengalami kerusakan.
13. Masih kurangnya pengalokasian anggaran Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi yang sudah terbangun.
14. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas petani pemakai air yang responsif gender.
15. Masih kurangnya pengalokasian anggaran untuk pembenahan jaringan irigasi tambak yang sudah terbangun di Kabupaten Bone.
16. Masih banyaknya potensi daerah irigasi baru yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bone yang belum dibangun dan atau butuh untuk dikembangkan.
17. Belum memadainya tingkat pelayanan operasional UPT Pengelolaan

Sumber Daya Air yang baru terbentuk.

18. Belum memadainya *database* irigasi, tambak, sungai, bangunan konservasi dan pantai.
19. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku untuk masyarakat.
20. Masih kurangnya sumur-sumur air tanah yang terbangun dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Bone Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2013-2018 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Bone Tahun 2019-2023, adalah:

"Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya saing Dan Sejahtera"

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Masyarakat Bone adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Bone
2. Mandiri dalam pengertian mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, pemberdayaan pelaku ekonomi dan kelestarian lingkungan.
3. Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan di tingkat global.

4. Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Bone.

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten, dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, yang akan ditempuh melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Untuk menerjemahkan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Bone ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, maka dapat ditelaah dari misi ke-2 (kedua) dari RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018– 2023 yaitu :

“Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.”

Peran Dinas Pengelolaan Sumber Daya air dalam ikut mencapai misi ke-2 (kedua) melalui 4 (empat) program prioritas yaitu :

1. Program Pengendalian Banjir
2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
4. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan program-programnya sesuai RPJMN , diantaranya yang sangat terkait dengan tupoksi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Berdasarkan matriks Renstra Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Program Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tujuan meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Sumber Daya Air untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.

Adapun sasaran strategis dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air Renstra Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini adalah meningkatkan layanan jaringan irigasi dan rawa, meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai

kebutuhan, serta berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir. Adapun *outcome* dari program ini adalah meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

Adapun faktor penghambat diantaranya:

1. Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pelestarian fungsi dan layanan sumber daya air.
2. Perubahan iklim dan fenomena *el-nino* serta indeks kekeringan yang tinggi dan tidak menentu berdampak pada kurangnya ketersediaan air pada sumber-sumber air (sungai, cekungan air tanah, dan tampungan-tampungan alami lainnya) pada musim-musim tertentu.
3. Rendahnya mutu perencanaan dan lemahnya pengawasan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan yang harus diakomodir dan perumusan serta penganggaran kegiatan yang belum menganut prinsip pembangunan yang efektif dan efisien.
4. Penanganan dan penanggulangan permasalahan banjir dan genangan yang masih bersifat sektoral dan kasuistik yang belum mampu menuntaskan masalah karena belum dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif yang langsung menyentuh akar permasalahan banjir, serta belum didukung oleh perencanaan penanganan dan penanggulangan banjir yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait, yang dituangkan dalam suatu *masterplan* penanganan banjir khususnya dalam wilayah perkotaan.
5. Penyusunan revisi RTRW Kabupaten Bone yang belum selesai.

Adapun faktor pendorong diantaranya:

1. Mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian.
2. Ketersediaan sumber dana untuk mendukung kegiatan.

3. Penyelesaian penetapan RTRW Kabupaten Bone, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembangunan.

Dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam pencapaian target Renstra Dinas PSDA maupun RPJMD Kabupaten Bone adalah :

1. Adanya dana transfer daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Serta Jaringan Pengairan Lainnya.
2. Adanya Program *Integration Participatory Development Management Irrigation Project (IPDMIP)* untuk pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, penyediaan dan pengolahan air baku, serta pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kegiatan-kegiatan di bawah ini adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan membutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir di RTRWK akan diakomodir dalam revisi RTRWK serta yang belum direncanakan untuk dilakukan KLHS padanya, akan diakomodir dalam revisi Renstra berikutnya.

1. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya, yang meliputi pembuatan embung, kolam tampungan buatan, kolam mata air, dan cekdam.
2. Peningkatan Konservasi Air Tanah, yang meliputi pembuatan bangunan/fasilitas penangkar/konservasi air tanah.
3. Pembangunan Jaringan Irigasi, yang meliputi pengembangan jaringan-jaringan irigasi baru yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan penyangga pertanian.
4. Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah, baik untuk keperluan irigasi

pertanian maupun untuk pemenuhan suplai air baku masyarakat.

Adapun faktor penghambat diantaranya:

1. Revisi RTRWK masih sementara berproses saat Renstra ini disusun.
2. Kegiatan KLHS terhadap kegiatan-kegiatan di atas belum dimasukkan dalam Renstra ini karena belum adanya kesepakatan antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air selaku *stakeholder* yang membutuhkan kajian ini dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi yang memiliki tupoksi terkait dengan kegiatan ini.

Adapun faktor pendorong diantaranya:

1. Menunggu penetapan revisi RTRWK.
2. Kesesuaian program prioritas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan RTRWK.
3. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Startegis

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan memperhatikan bahwa isu tersebut:

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Provinsi,
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
3. Berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone,
4. Menjadi faktor pendorong terhadap peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Bone,
5. Kemudahan untuk menangani, dan
6. Prioritas janji politik yang harus diwujudkan.

Adapun isu-isu strategis dari identifikasi masalah dari program-program prioritas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut:

1. Masih kurangnya fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) yang sudah terbangun di daerah-daerah pantai yang ada di Kabupaten Bone.
2. Masih banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang sangat rentan atau rawan longsor.
3. Tingginya tingkat agradasi atau pendangkalan dasar sungai yang terjadi di sungai-sungai utama yang ada di Kabupaten Bone.
4. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal ini oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Masih kurangnya dan atau belum optimalnya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air permukaan, dan bangunan konservasi air tanah.
6. Belum lengkapnya dan atau belum optimalnya fasilitas pintu air yang ada pada bangunan-bangunan pengambilan air irigasi yang sudah terbangun.
7. Kurangnya pengalokasian anggaran O dan P jaringan irigasi yang sudah terbangun dan untuk keperluan pembenahan irigasi tambak yang sudah terbangun.
8. Masih kurangnya kegiatan pemberdayaan petani pemakai air yang responsif gender.
9. Masih banyaknya potensi irigasi baru yang belum dikembangkan.
10. Terbentuknya 8 (delapan) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air belum dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan operasional.
11. Penyusunan *database* irigasi, tambak, sungai, bangunan konservasi dan pantai yang belum memadai.
12. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengambilan, saluran pembawa, dan sumur-sumur air tanah untuk pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Kabupaten Bone mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Bone maka dirumuskan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah misi ke-1 (satu) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan misi ke-4 (empat) yaitu mengoptimalkan akselerasi pembangunan

daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Untuk misi ke-1 (satu), tujuan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah tujuan ke-1 (satu) yakni mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan sasaran membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan, yang diukur dengan indikator nilai SAKIP dengan target peningkatan dari Predikat C di tahun dasar RPJMD (2017) menjadi Predikat B di tahun akhir RPJMD (2023).

Untuk misi ke-4 (empat), tujuan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah tujuan ke-11 (sebelas) yakni mengembangkan infrastruktur dasar, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar bidang sumber daya air, yang diukur dengan tiga indikator kinerja utama sebagaimana yang akan dijabarkan dalam pembahasan selanjutnya.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas PSDA

Perumusan tujuan jangka menengah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi tersebut maka ditetapkanlah tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Indikator tujuan ini adalah predikat evaluasi SAKIP oleh APIP (Inspektorat Daerah) dengan target kinerja yang ingin dicapai dari Predikat C di tahun dasar Renstra (2017) menjadi Predikat A di tahun akhir RPJMD (2023).

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Indikator tujuan ini juga menjadi indikator kinerja utama (IKU) dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang terjabarkan menjadi 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru, dengan target kinerja yang ingin dicapai dari 10% di tahun dasar Renstra (2017) menjadi 70% di tahun akhir RPJMD (2023).
- Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dengan target kinerja yang ingin dicapai dari 76,72% di tahun dasar Renstra (2017) menjadi 85% di tahun akhir RPJMD (2023).
- Rasio jaringan irigasi, dengan target kinerja yang ingin dicapai dari 4,85 Meter/Hektar di tahun dasar Renstra (2017) menjadi 4,97 Meter/Hektar di tahun akhir RPJMD (2023).

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas PSDA

Terkait dengan tujuan jangka menengah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di atas, maka dirumuskanlah sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian tujuan tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air, yang diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran yang

juga menjadi indikator tujuan Renstra ini, yaitu:

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
2. Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman, yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran:
 - Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman.
 - Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing.
 - Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi.
 3. Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi, yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran yang juga menjadi indikator tujuan Renstra ini, yaitu:
 - Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru.
 - Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.
 - Rasio jaringan irigasi.

Selengkapnya, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 tertuang dalam Tabel 4.1.

Keselarasan antara misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan dan sasaran Renstra pelayanan perangkat daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone beserta unit kerja (bidang) penanggung jawab pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.25)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	C	CC	B	B	BB	BB	A
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman.	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman (Persen)	NA	5	10	15	20	25	30
			Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing (Persen)	NA	5	20	40	60	70	80
			Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi (Persen)	NA	5	20	40	60	70	80
		Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi.	Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru (Persen) (IKU).	10	20	30	40	50	60	70
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persen) (IKU).	76.72	78.10	79.48	80.86	82.24	83.62	85	
		Rasio jaringan irigasi (M/Ha) (IKU).	3.71	4.30	4.68	5.05	5,44	5.83	6.21	

Keterangan: NA = *Not Available* ; Data belum ada/ sementara pendataan.

Sumber: Hasil Rumusan

Tabel 4.2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023

Misi : Ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ke-4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.		RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023	
Tujuan : 1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 11. Mengembangkan infrastruktur dasar.			
Sasaran : 1.1. : Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan. 11.1 : meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar.			
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Penanggungjawab
Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (Misi Ke-1; Tujuan 1).	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air (Sasaran 1.1).	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP.	Sekretariat; Seluruh Bidang
Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan (Misi Ke-4; Tujuan 11).	Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman (Sasaran 11.1).	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman.	Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku.
		Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing.	Bidang Sungai, Danau dan Waduk.
		Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi.	Bidang Sungai, Danau dan Waduk.
	Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi (Sasaran 11.1).	Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru (IKU).	Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku.
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU).	Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku.
		Rasio jaringan irigasi (IKU).	Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku.

Sumber: Hasil Rumusan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Guna mewujudkan pencapaian misi ke-1 (satu) Pemerintah Kabupaten Bone, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan, maka diperlukan strategi yang terimplementasi dalam arah kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

5.2 Arah Kebijakan

Jika dikelompokkan maka setidaknya terdapat 12 (dua belas) arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dalam mewujudkan 8 (delapan) strategi dari pencapaian 3 (tiga) sasaran dalam rangka menuju 2 (dua) tujuan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2018-2023 ini.

Ringkasan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dalam 5 (lima) tahun ke depan terangkum dalam Tabel.5.1 (Tabel T-C.26).

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Tabel T-C.26)

Visi : Masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera			
Misi Ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air.	1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.	1. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
		2. Meningkatkan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan/kinerja.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang berintegritas . 1. Peningkatan konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta pelaporan pertanggungjawaban (Renstra, Renja, RKA, DPA/DPPA, SPJ dan LKjIP).
Misi Ke-4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.	1. Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman.	1. Mewujudkan ketersediaan data daerah rawan banjir yang aktual dan berkelanjutan.	1. Pemenuhan kebutuhan akan database sungai dan pantai.
		2. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir (alami maupun buatan).	2. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian sasaran.
		3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian banjir.	1. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir yang dibutuhkan. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir agar fungsinya tetap baik.
	2. Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi.	1. Mewujudkan ketersediaan data daerah irigasi dan fasilitas penunjangnya yang aktual dan berkelanjutan.	1. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan partisipatif.
		2. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja sarana dan prasarana daerah irigasi dan fasilitas penunjangnya.	1. Pemenuhan kebutuhan akan database irigasi (permukaan, pompa, air tanah dan tambak) dan database bangunan pengambilan air dan konservasi. 2. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian sasaran.
		3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan air untuk pemenuhan kebutuhan daerah irigasi.	1. Pembangunan sarana dan prasarana irigasi dan bangunan pengambilan/konservasi air yang dibutuhkan. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana irigasi dan bangunan pengambilan/konservasi air agar fungsinya tetap baik. 1. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan partisipatif.

Sumber : Hasil Rumusan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Renstra Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ini juga berisi indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone termasuk dalam urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum khususnya yang terkait dengan bidang sumber daya air dengan 4 (empat) program utama sebagaimana telah disinggung pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Program Pengendalian Banjir.

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja program ini adalah persentase sarana dan prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik.

2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja program ini adalah persentase embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik.

3. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja program ini adalah persentase bangunan penuplai air baku yang

termanfaatkan

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja program ini adalah persentase daerah irigasi yang memiliki nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) minimal baik.

Di samping itu untuk mendukung 4 (empat) program prioritas di atas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone juga melaksanakan lima (lima) program ex-BAU (Belanja Administrasi Umum), antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum.

Secara terperinci tentang rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (Tabel T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Menurunkan daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan proteksi tebing	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman.				5%	10%		15%		20%		25%		30%		30%			
		Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing				5%	20%		40%		60%		70%		80%		80%			
		Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi.				5%	20%		40%		60%		70%		80%		80%			
			1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Persentase Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Dalam Kondisi Baik	80%	90%	60,200,000,000	100%	85,200,000,000	100%	85,200,000,000	100%	85,200,000,000	100%	85,200,000,000	100%	401,000,000,000	Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air; Bidang Bina Teknik	Tersebar di beberapa kecamatan
			-	Penyusunan Sistem Informasi/Database Sungai dan Pantai	Jumlah Data Base sungai dan pantai di Kecamatan (Kecamatan)	-	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	7	300,000,000	27	1,500,000,000	Seksi Rawa dan Pantai; Seksi Data dan Informasi; Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk	Tersebar di beberapa kecamatan

Tabel 6. 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Perencanaan Prasarana Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan teknis (Pengaman Pantai) yang tersusun (Dokumen)	1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	5	1,500,000,000	Seksi Rawa dan Pantai; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.28.09	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Panjang fasilitas pengaman pantai yang terbangun (Km)	0.112 Km	1	10,000,000,000	1	10,000,000,000	1	10,000,000,000	1	10,000,000,000	1	10,000,000,000	5	50,000,000,000	Seksi Rawa dan Pantai	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.28.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Panjang bantaran dan tanggul sungai yang terpelihara (Km)	8.717 Km	5	49,400,000,000	5	49,400,000,000	5	49,400,000,000	5	49,400,000,000	5	49,400,000,000	25	247,000,000,000	Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.28.07	Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Panjang sungai/saluran pembuang yang sudah dinormalisasi (Km)	29.550 Km	-	-	10	25,000,000,000	10	25,000,000,000	10	25,000,000,000	10	25,000,000,000	40	100,000,000,000	Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.28.05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir	Jumlah kegiatan partisipatif masyarakat dalam penanggulangan banjir yang terlaksana (Kegiatan)	NA	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	25	500,000,000	Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.28.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengendalian Banjir	Jumlah dokumen monitoring evaluasi yang dilaporkan (Dokumen)	NA	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik; Semua seksi yang terkait masing-masing kegiatan.	Kec. T.Riattang Timur

Tabel 6. 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi.	Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru.	1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dalam Kondisi Baik	70%	80%	10,200,000,000	100%	10,200,000,000	100%	10,200,000,000	100%	10,200,000,000	100%	10,200,000,000	100%	51,000,000,000	Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air; Bidang Bina Teknik	Tersebar di beberapa kecamatan
			-	1 Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung / Konservasi Air Lainnya.	Jumlah dokumen perencanaan teknis (Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya) yang tersusun(Dokumen)	2 Dokumen	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	5	1,500,000,000	Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.26.01	2 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang sudah dimanfaatkan (Unit)	265 Unit	10	4,700,000,000	10	4,700,000,000	10	4,700,000,000	10	4,700,000,000	10	4,700,000,000	50	23,500,000,000	Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.26.02	3 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung air Lainnya	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dalam kondisi baik (Unit)	265 Unit	10	3,000,000,000	10	3,000,000,000	10	3,000,000,000	10	3,000,000,000	10	3,000,000,000	50	15,000,000,000	Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.26.05	4 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang terlaksana (Kegiatan)	NA	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	25	500,000,000	Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.26.06	5 Peningkatan konservasi air tanah	Jumlah bangunan konservasi air tanah yang dimanfaatkan (Unit)	-	10	2,000,000,000	10	2,000,000,000	10	2,000,000,000	10	2,000,000,000	10	2,000,000,000	50	10,000,000,000	Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.26.07	6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya)	Jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi yang dilaporkan (Dokumen)	2 dokumen	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik; Semua seksi yang terkait masing-masing kegiatan.	Kec. T.Riattang Timur

Tabel 6. 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			1.03.25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase Bangunan Penuisplai Air Baku Yang Termanfaatkan (%)	0%	10%	9,500,000,000	20%	8,000,000,000	30%	8,000,000,000	40%	8,000,000,000	50%	8,000,000,000	50%	41,500,000,000	Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air; Bidang Bina Teknik	Tersebar di beberapa kecamatan	
			-	1	Penyusunan Sistem Informasi/ Database Bangunan Pengambilan Air Baku/ Konservasi di Kecamatan (Kecamatan) Baku/Konservasi	Jumlah Data Base Bangunan Pengambilan Air Baku/ Konservasi di Kecamatan (Kecamatan)	-	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	7	300,000,000	27	1,500,000,000	Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduki; Seksi Irigasi dan Air Baku; Seksi Data dan Informasi.	Tersebar di beberapa kecamatan
			-	2	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Baku	Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun.	-	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	5	1,500,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.25.05	3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air	Jumlah DI yang telah memiliki organisasi P3A aktif dan partisipatif. (P3A/GP3A)	17	18	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1,500,000,000	Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduki; Seksi Bina Kelembagaan; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air.	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.25.03	4	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Jumlah prasarana pengambilan dan panjang saluran pembawa yang telah dimanfaatkan. (Unit)	-	6	4,650,000,000	6	4,650,000,000	6	4,650,000,000	6	4,650,000,000	6	4,650,000,000	30	23,250,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.25.04	5	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah (SAT)	Jumlah Sumur-Sumur Air Tanah (SAT) yang telah dimanfaatkan. (Unit)	4 Unit	10	2,650,000,000	10	2,650,000,000	10	2,650,000,000	10	2,650,000,000	10	2,650,000,000	50	13,250,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku	Tersebar di beberapa kecamatan
			-	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku)	Jumlah dokumen monitoring evaluasi yang dilaporkan (Dokumen)	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik; Semua seksi yang terkait masing-masing kegiatan.	Kec. T.Riattang Timur

Tabel 6. 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Daerah Irigasi Yang Memiliki Nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) Minimal Baik (%)	NA	70%	40,050,000,000	75%	38,530,000,000	80%	30,750,000,000	85%	30,890,000,000	90%	30,650,000,000	90%	170,870,000,000	Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Bina Teknik; Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air; Seluruh UPT Dinas	Tersebar di beberapa kecamatan
		Rasio Jaringan Irigasi.	1.03.24.05	1 Perencanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun. (Dokumen)	8 Dokumen	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	20	2,000,000,000	Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk; Seksi Perencanaan Bina	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.14	2 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Panjang sungai/saluran pembuang yang sudah dinormalisasi. (Km)	29.550 Km	3	1,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,300,000,000	Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.01	3 Perencanaan Pembangunan jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun. (Dokumen)	1 Dokumen	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	20	2,000,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku; Seksi Rawa dan Pantai; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air	Tersebar di beberapa kecamatan
			-	4 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun. (Dokumen)	12 Dokumen	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	20	2,000,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Seksi Rawa dan Pantai; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.08	5 Pembangunan Pintu Air	Jumlah pintu air yang telah di Bangun/manfaatkan (Unit)	33 Unit	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	50	1,000,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku	Tersebar di beberapa kecamatan

Tabel 6. 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.03.24.10	6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (M)	80,180 Meter	1000	8,000,000,000	1000	8,000,000,000	1000	8,000,000,000	1000	8,000,000,000	1000	8,000,000,000	5000	40,000,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.13	7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air dalam kondisi baik (Unit)	33 Buah	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	50	750,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.15	8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan alokasi dana operasional (DI)	232 DI	10	1,000,000,000	10.00	1,000,000,000	10.00	1,000,000,000	10.00	1,000,000,000	10.00	1,000,000,000	50	5,000,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.16	10 Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Jumlah DI yang telah memiliki organisasi P3A aktif dan partisipatif (DI)	30 DI	30	300,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	64	640,000,000	40	400,000,000	234	2,340,000,000	Seksi Bina Kelembagaan; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air.	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.24.17	11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang dilaporkan (Dokumen)	5 Dokumen	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik; Semua seksi yang terkait masing-masing kegiatan.	Tersebar di beberapa kecamatan
			-	12 Peningkatan Jaringan daerah Irigasi tambak	Panjang jaringan irigasi tambak yang telah dimanfaatkan dalam kondisi baik (KM)	8.40 Km	2400	1,200,000,000	3500	2,100,000,000	5000	2,500,000,000	5000	2,500,000,000	5000	2,500,000,000	20900	10,800,000,000	Seksi Rawa dan Pantai	Tersebar di beberapa kecamatan

Tabel 6. 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			1.03.24.21	13	Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang telah dimanfaatkan. (Meter)	416,894 Meter	10000	15,000,000,000	8000	13,300,000,000	10000	15,000,000,000	10000	15,000,000,000	10000	15,000,000,000	48000	73,300,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.22	14	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Palakka	Jumlah Operasional UPT Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Palakka (Kegiatan)	NA	1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	850,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Palakka	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.23	15	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sanrego	Jumlah Operasional UPT Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sanrego (Kegiatan)	NA	1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	850,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sanrego	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.24	16	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Salomekko	Jumlah Operasional UPT Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Salomekko (Kegiatan)	NA	1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	850,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Salomekko	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.25	17	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ponre-Ponre	Jumlah Operasional UPT Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Ponre-Ponre (Kegiatan)	NA	1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	850,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ponre-Ponre	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.26	18	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Unyi	Jumlah Operasional UPT Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Unyi (Kegiatan)	NA	1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	850,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Unyi	Tersebar di beberapa kecamatan

Tabel 6. 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			1.03.24.27	19	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Wollangi (Kegiatan)	Jumlah Operasional UPT Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Wollangi (Kegiatan)	NA	1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	850,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Wollangi	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.28	20	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengo (Kegiatan)	Jumlah Operasional UPT Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Bengo (Kegiatan)	NA	1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	850,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengo	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.29	21	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pattiro (Kegiatan)	Jumlah Operasional UPT Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Pattiro (Kegiatan)	NA	1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	850,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pattiro	Tersebar di beberapa kecamatan
			1.03.24.30	22	Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi (DI) permukaan terdaftar yang telah memiliki database. (DI)	224 DI	60		56								116			
					Jumlah Sistem Informasi/ Database Jaringan irigasi permukaan baru di Kecamatan (Kecamatan)		-	5	800,000,000	5	780,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	25	3,080,000,000	Seksi Irigasi dan Air Baku; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Seksi Data dan Informasi	Tersebar di beberapa kecamatan
					Jumlah Sistem Informasi/ Database Jaringan Irigasi tambak di Kecamatan (Kecamatan)		-	2		2		3	2		2			11			
			1.03.24.31	23	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat	Jumlah daerah irigasi yang telah direhabilitasi dan dilengkapi fasilitas O&P jaringan irigasi-nya melalui dana bantuan (DI)	NA	4	10,000,000,000	4	10,000,000,000	-	-	-	-	-	-	8	20,000,000,000	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Seksi Bina Kelembagaan; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air.	Tersebar di beberapa kecamatan

Tabel 6. 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	100%	1,150,000,000	100%	1,150,000,000	100%	1,150,000,000	100%	1,150,000,000	100%	1,150,000,000	100%	5,750,000,000	Sekretariat	Kec. T.Riatang Timur
			1.03.01.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik (Rekening)	36	36	60,000,000	36	60,000,000	36	60,000,000	36	60,000,000	36	60,000,000	180	300,000,000	Sub Bagian Keuangan	Kec. T.Riatang Timur
			1.03.01.07	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	61	732	350,000,000	732	350,000,000	732	350,000,000	732	350,000,000	732	350,000,000	3660	1,750,000,000	Sub Bagian Keuangan	Kec. T.Riatang Timur
			1.03.01.13	3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang tersedia (Paket)	12	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	60	150,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riatang Timur
			1.03.01.15	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	96	96	50,000,000	96	50,000,000	96	50,000,000	96	50,000,000	96	50,000,000	480	250,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riatang Timur
			1.03.01.23	5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (Kegiatan)	60	60	600,000,000	60	600,000,000	60	600,000,000	60	600,000,000	60	600,000,000	300	3,000,000,000	Sub Bagian Keuangan	Kec. T.Riatang Timur
			1.03.01.24	6 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	48	48	60,000,000	48	60,000,000	48	60,000,000	48	60,000,000	48	60,000,000	240	300,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riatang Timur

Tabel 6. 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%	100%	1,650,000,000	100%	2,101,000,000	100%	2,252,100,000	100%	2,403,310,000	100%	2,554,641,000	100%	10,961,051,000	Sekretariat	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.02.05	1 Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	15	5	600,000,000	5	600,000,000	5	600,000,000	5	600,000,000	5	600,000,000	25	3,000,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.02.07	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Paket)	10 Unit AC 1 Unit TV 2 Set Gorden 1 Unit Sound Sistem	5	200,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	25	2,200,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.02.09	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Paket)	16 PC 7 Unit Laptop 14 Printer 2 Unit LCD 1 Unit Kamera Digital	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	25	1,500,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.02.10	4 Pengadaan Mebeuleur	Jumlah pengadaan mebeuleur kantor (Paket)	20 Buah Meja Kerja, 20 Buah Kursi Kerja, 20 Lemari arsip, 20 Filling Kabinet	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	20	200,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur
			...	5 Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi (Unit)	-	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	35	250,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.02.22	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor (Unit)	2	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	5	1,500,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.02.24	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara (Unit)	5 Mobil 10 Motor	20	150,000,000	25	300,000,000	30	450,000,000	35	600,000,000	40	750,000,000	150	2,250,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.02.28	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara (Unit)	21	21	10,000,000	21	11,000,000	21	12,100,000	21	13,310,000	21	14,641,000	105	61,051,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur

Tabel 6. 1. Lanjutan (Selesai)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur yang Telah Mengikuti Diklat Formal dan Non Formal (%)	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000	Sekretariat	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.05.01	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat pelatihan (Orang)	7 Orang Diklatpim 8 Orang Diklat lainnya	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	15	500,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.05.02	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek (Orang)	5	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	500,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.06.01	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun (Dokumen)	5	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	25	100,000,000	Sub Bagian Program	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100%	100%	80,000,000	100%	84,000,000	100%	88,400,000	100%	93,240,000	100%	98,564,000	100%	444,204,000	Sekretariat; Bidang Bina Teknik	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.08.01	1 Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (dokumen).	5	6	40,000,000	5	44,000,000	6	48,400,000	5	53,240,000	5	58,564,000	27	244,204,000	Sub Bagian Program; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik	Kec. T.Riattang Timur
			1.03.08.03	2 Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah promosi dan pameran pembangunan yang diikuti (kegiatan)	3	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	5	200,000,000	Seksi Data dan Informasi	Kec. T.Riattang Timur

Sumber : Hasil Rumusan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini akan dikemukakan indikator kinerja utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini merupakan indikator kinerja utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati terkait dengan penetapan indikator utama dari setiap organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bone. Indikator-indikator ini juga telah disinggung dalam pembahasan Bab IV sebagaimana yang telah lalu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terjabarkan dalam 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru, **dalam** % (persen).
- Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, **dalam** % (persen).
- Rasio jaringan irigasi, **dalam** M/Ha (meter per hektar).

Selengkapnya penjabaran indikator-indikator di atas beserta target capaian tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 7.1 (Tabel T-C.28).

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
			TAHUN KE-1 (2019)	TAHUN KE-2 (2020)	TAHUN KE-3 (2021)	TAHUN KE-4 (2022)	TAHUN KE-5 (2023)	
1.	Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru (Persen).	20	30	40	50	60	70	70
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persen).	78.10	79.48	80.86	82.24	83.62	85.00	85
3.	Rasio jaringan irigasi (M/Ha).	4.30	4.68	5.05	5,44	5.83	6.21	6.21

Sumber : Hasil Rumusan.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Renstra ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Renstra ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan menjadi pedoman bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018-2023.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berkewajiban untuk melakukan upaya penyesuaian terhadap penjabaran Tahun 2018-2023 ke dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2019. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2018-2023. Selain hal-hal yang tersebut di atas, adanya penguatan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone merupakan faktor yang sangat penting dan dibutuhkan adanya.

Terakhir, sebagai catatan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, Renstra ini sudah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun harapannya alokasi anggaran dapat dipenuhi sesuai kebutuhan agar target sasaran Renstra dapat tercapai dan kondisi cuaca yang kondusif, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan sehingga target sasaran pada Renstra ini dapat tercapai.